

**STRATEGI DINAS KESEJAHTERAAN RAKYAT
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA (DKRPP&KB) DALAM MENCEGAH
PENYIMPANGAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
2008 DI KOTA SURAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi

Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:

Idha Utarini

D.0105081

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2009

PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pembimbing

Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si

NIP. 196411231988031001

PENGESAHAN

Telah disetujui dan disahkan Panitia Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Pada hari :

Tanggal :

Panitia Penguji :

1. Ketua : (.....)
Dra. Sri Yuliani, M.Si

2. Sekretaris : (.....)
Rino A. Nugroho, S.Sos, M.T.I

3. Penguji : (.....)
Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Dekan,

Drs. Supriyadi SN. SU.
NIP. 195301281981031001

PERNYATAAN

Nama : IDHA UTARINI

NIM : D 0105081

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

Strategi dinas kesejahteraan rakyat pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (DKRPP & KB) dalam mencegah penyimpangan dana bantuan langsung tunai (BLT) 2008 di kota Surakarta adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surakarta, 31 Juli 2009

Yang membuat pernyataan,

IDHA UTARINI

MOTTO

“ Janganlah berputus asa karena ia bukan akhlak kaum muslimin. Hakikat hari ini adalah impian hari kemarin, dan impian hari ini adalah kenyataan hari esok. Kesempatan masih luas dan unsur-unsur kebaikan masih kuat dan besar dalam jiwa kalian yang mukmin, meskipun tertutupi oleh berbagai fenomena kerusakan. Yang lemah tidak selamanya lemah, dan yang kuat tidak selamanya menjadi kuat ”

(Imam Hasan al-Banna)

” Satu-satunya hal yang tidak berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri ”

(Anonim)

“ Dalam hidup,terkadang kita lebih banyak mendapatkan apa yang tidak kita inginkan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, akhirnya kita tahu bahwa yang kita inginkan terkadang tidak dapat membuat hidup kita menjadi

lebih bahagia ”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk :

- (Alm) Ayahku tercinta
- Bundaku tersayang atas doa dan bimbingan yang selalu mengiringi setiap langkahku.
- Fazyku yang mengisi hari-hariku dan selalu memberi semangat untuk tidak menyerah.
- Keluarga dan sepupu-sepupuku yang mendukungku dan menanyakan kapan kelulusanku.
- Teman-teman seperjuangan AN 05
- Almamaterku Ilmu Administrasi FISIP UNS

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **STRATEGI DINAS KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (DKRPP & KB) DALAM MENCEGAH PENYIMPANGAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) 2008 DI KOTA SURAKARTA.**” Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dan meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs Widdi Srihanto, MM selaku Kepala DKRPP&KB Kota Surakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Ibu Dra. Titik Budi Rahayu, Msi selaku Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta yang telah meluangkan waktunya dan banyak membantu penulis mendapatkan data selama proses penyusunan skripsi.
4. Ibu Sri Iriana, SH selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat atas kesediaannya menjadi narasumber serta seluruh staf DKRPP&KB Kota Surakarta yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Dra. Hermiawati, selaku Kepala Bagian Sosial BPS Kota Surakarta dan seluruh staf BPS atas kesediaannya menjadi narasumber serta seluruh staf DKRPP&KB Kota Surakarta yang

telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.

6. Teman-teman di AN 2005 serta sahabat-sahabatku yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut memberikan dukungan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan pada diri penulis. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan

Surakarta, 31 Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12

1. Landasan Teori.....	12
a. Pengertian Strategi	13
b. Strategi DKRPP&KB	26
c. Bantuan Langsung Tunai	27
2. Kerangka Pemikiran.....	32
F. Definisi Konseptual dan Operasional	34
1. Definisi Konseptual.....	34
2. Definisi Operasional	35
G. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Lokasi Penelitian	37
3. Jenis Data	38
4. Teknik Pengambilan Sampel	39
5. Teknik Pengambilan Data	39
6. Validitas Data.....	41
7. Teknik Analisis Data	41

BAB II DESKRIPSI LOKASI

A. Keadaan Umum Kota Surakarta	44
1. Kondisi Geografis Kota Surakarta.....	44
2. Kondisi Demografis Kota Surakarta.....	44
B. Gambaran Umum DKRPP&KB Kota Surakarta	46
1. Sejarah Berdirinya	46

2. Dasar Hukum	47
3. Tugas Pokok dan Fungsi	47
4. Visi	48
5. Misi	48
6. Rencana Kerja	48
7. Struktur Organisasi	55
8. Keadaan Pegawai DKRPP&KB	62
9. Program Bantuan Langsung Tunai	64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program BLT dan Permasalahannya	67
1. Tahap Sosialisasi dan Pendataan	72
2. Permasalahan dalam Penyaluran BLT kepada RTS	79
B. Strategi DKRPP&KB dalam Mencegah Penyimpangan	
Dana BLT 2008 di Kota Surakarta.....	83
1. Pelaksana Strategi dalam Mencegah Penyimpangan Dana	
BLT 2008 di Kota Surakarta	84
2. Bentuk Strategi yang digunakan	88
3. Implementasi Strategi DKRPP&KB dalam Mencegah Penyimpangan Dana BLT	
2008 di Kota Surakarta	102

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.	116

DAFTAR PUSTAKA 118

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 1.2	Analisis Model Interaktif.....	42
Gambar 2.1	Struktur Organisasi DKRPP&KB Kota Surakarta.....	57
Gambar 3.1	Skema Penyaluran BLT Kepada RTS	71
Gambar 3.2	Strategi Pencacahan RTS dalam Program BLT 2008.....	77
Gambar 3.3	Mekanisme Pencacahan PPLS08.....	78
Gambar 3.4	Struktur Organisasi Program BLT	85
Gambar 3.5	Matriks Hasil Penelitian	110

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Jumlah Penerima BLT di Kota Surakarta Tahun 2005	9
Tabel 1.2	Bantuan Langsung Tunai di Berbagai Negara.....	27
Tabel 2.1	Jumlah Keluarga Miskin di Kota Surakarta 2007.....	45
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai DKRPP&KB Berdasarkan Tingkat Pendidikannya	63
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai DKRPP&KB Berdasarkan Pangkat dan Golongannya	63
Tabel 2.4	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Menerima KKB di Kota Surakarta Tahun 2008.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Pedoman Wawancara
- Lampiran II Surat Permohonan Ijin Penelitian
- Lampiran III Surat Keterangan telah menyelesaikan penelitian
- Lampiran IV Instruksi Presiden No 3 Tahun 2008

ABSTRAK

IDHA UTARINI, D 0105081, STRATEGI DINAS KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (DKRPP&KB) DALAM MENCEGAH PENYIMPANGAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) 2008 DI KOTA SURAKARTA, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, 119 Halaman.

Kenaikan harga BBM yang diikuti oleh kenaikan berantai berbagai harga barang dan jasa kebutuhan sehari-hari lainnya berpengaruh langsung terhadap penurunan daya beli sebagian besar masyarakat, terutama rumah tangga miskin. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) berupa Bantuan langsung Tunai (BLT) tanpa syarat kepada rumah tangga miskin merupakan kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan sosial masyarakat ditengah melonjaknya harga barang dan jasa kebutuhan. Dasar hukumnya adalah Inpres No 3 Tahun 2008. Penyaluran dana BLT yang diwarnai dengan berbagai penyimpangan dana mengharuskan DKRPP&KB Kota Surakarta sebagai pelaksana Program tingkat Kota untuk meminimalisir penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi DKRPP&KB dalam mencegah penyimpangan dana BLT 2008 di Kota Surakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji validitas data digunakan triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini, strategi yang digunakan DKRPP&KB Kota Surakarta dalam mencegah penyimpangan dana BLT 2008 di Kota Surakarta meliputi (1) sosialisasi berjenjang ke tingkat bawah sebelum pelaksanaan Program BLT; (2); optimalisasi monitoring untuk mengetahui sedini mungkin permasalahan yang mencuat pada saat pelaksanaan Program BLT (3) untuk mencegah adanya pemotongan dana oleh aparat setempat, maka DKRPP&KB Kota Surakarta bekerja sama dengan Kantor Pos agar pada saat pembayaran dana BLT diambil oleh RTS yang berhak menerima dengan memenuhi ketentuan yang ada; (4) untuk mengantisipasi adanya warga yang tidak terima karena tidak mendapat dana BLT, maka DKRPP&KB Kota Surakarta meminta petugas BPS untuk hadir pada saat pembayaran. Strategi yang selanjutnya adalah evaluasi tentang bagaimana pelaksanaan Program BLT 2008 di Kota Surakarta, yang kemudian hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada pemerintah pusat. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan yang sama untuk program lainnya yang akan datang.

ABSTRACT

IDHA UTARINI, D 0105081. THE STRATEGY OF PEOPLE WELFARE, WOMEN EMPOWERMENT AND FAMILY PLANNING OFFICE (DKRPP&KB) IN PREVENTING THE UNCONDITIONAL CASH TRANSFER (BLT) MISUSAGE IN 2008 IN SURAKARTA CITY, Thesis, Administration Department, Faculty of Social and Politic Science, Sebelas Maret University, 2009, 119 Pages.

The increase price of fuels followed by the increased of price daily needs product and service affects directly the decreased purchasing power of majority society, particularly the poor family. The Fuel Subsidy Reduction Compensation Program (PKPS-BBM) in the form Unconditonal Cash Transfer (BLT) without any condition for the poor family is the governmental policy related to the society's social protection amid the increased price of requirement product and service. The legal foundation is The President Instruction No. 3 of 2008. The BLT fund distribution colored by any deviation requires the Surakarta City's DKRPP&KB as the implementing agent of the city level program to minimize such deviation. This research has aim to find out the strategy of DKRPP&KB in preventing the 2008 BLT Fund misuse in Surakarta City.

The research method employed was a descriptive qualitative. The sampling technique used was purposive sampling. Techniques of collecting data used were observation, interview, and documentation. For testing the validity of the data, the researcher uses data triangulation. In order to examine the data validity, the data triangulation was used. technique of analyzing data employed was an interactive model consisting of data reduction, display, and conclusion drawing.

The result of this research shows that the strategies which are use by the Surakarta City's DKRPP&KB in preventing the deviation of the 2008 BLT fund in Surakarta are (1) socialization level by level to the low level before the realization of BLT Program; (2) optimalization in monitoring in order to know as soon as possible the problem which appears in the realization of BLT Program; (3) to prevent the cutting fund by local officer, the Surakarta City's DKRPP&KB cooperates with post office so that in the payment process BLT fund is taken by RTS which has the right to accept by fulfilling the requirement; (4) to anticipate the citizens who complain because they do not get BLT fund, the Surakarta City's DKRPP&KB ask the BPS officer to attend the payment process. The next strategy is, which later on the result is reported level by level to central government. This is done in order not to make the same mistake for the next other program which will done

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu persoalan masyarakat yang sangat mendasar. Karena di satu sisi menentukan tingkat perkembangan suatu masyarakat dan di sisi lain menjadi salah satu indikator tidak berhasilnya proses pembangunan. Kemiskinan juga menjadi tanda dari perkembangan ekonomi pasar yang timpang dan kemunduran berbagai institusi sosial di dalam memecahkan persoalan penduduk.

Masalah kemiskinan terus menjadi persoalan masyarakat dan negara di dunia ini dari masa ke masa. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memerangi kemiskinan, bahkan di Tingkat International telah dideklarasikan dalam sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di ikuti oleh 189 negara anggota PBB pada bulan September 2000. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia untuk menyepakati dokumen yang disebut dengan Tujuan Pembangunan Millinium atau *Millenium Development Goals (MDG's)*. Delapan agenda yang ingin dicapai dalam MDGs antara lain : (1) penanggulangan kemiskinan absolut dan kelaparan yang ingin dicapai pada 2015; (2) pencapaian pendidikan dasar bagi semua anak laki-laki dan perempuan yang ingin dicapai pada tahun 2015; (3) pemberdayaan kesederajatanan gender dan perempuan; (4) pengurangan tingkat kematian anak; (5) peningkatan kesehatan ibu; (6) pemberantasan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya; (7) menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menghentikan perusakan lingkungan serta mendorong pembangunan berkelanjutan; (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Nurhadi, 2007:72).

Sementara bagi Indonesia persoalan kemiskinan menjadi satu persoalan tersendiri yang dari tahun ke tahun tidak pernah terselesaikan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia, dan diperlukan suatu strategi yang terpadu. Hal ini karena persoalan kemiskinan lebih bersifat multi dimensi daripada persoalan lainnya yang dihadapi oleh bangsa ini. Usaha memerangi kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Pemerintah juga terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan program penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor kehidupan.

Selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terjadi sebanyak tiga kali. Kenaikan harga BBM yang terakhir sebesar 28,7% semakin menambah beban hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak hanya dihadapkan pada kenaikan harga BBM saja, tetapi juga diikuti oleh kenaikan berantai berbagai harga barang dan jasa kebutuhan sehari-hari lainnya. Kenaikan harga tersebut berpengaruh langsung terhadap penurunan daya beli sebagian besar masyarakat, terutama rumah tangga miskin yang akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga di pasar.

Oleh karena itu, diperlukan suatu program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam bentuk program kompensasi (*compensatory program*) yang sifatnya khusus (*crash program*) atau jaring pengaman sosial (*social safety net*). Namun, pemberian subsidi BBM oleh pemerintah yang dahulu meringankan beban hidup masyarakat pada kenyataannya semakin membebani negara. Sehingga pada akhirnya pemerintah tidak mampu lagi memberikan subsidi BBM kepada masyarakat. Keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM lebih dikarenakan membekaknya subsidi BBM sebagai akibat meningkatnya harga minyak mentah di pasar

internasional hingga US\$ 120 per barel. Pemerintah juga menilai bahwa pemberian subsidi BBM selama ini cenderung lebih banyak dinikmati oleh masyarakat golongan menengah keatas dibandingkan masyarakat golongan menengah ke bawah yang dirasa lebih memerlukan subsidi BBM. Selain itu, perbedaan harga BBM yang besar antara dalam dan luar negeri juga memicu terjadinya penyelundupan BBM ke luar Indonesia yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampaknya bagi negara.

Pada tahun 2005 dan 2006 Pemerintah melaksanakan skema Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) meliputi :

1. PKPS BBM Tahap I :

- a. Bidang pendidikan, yang diarahkan untuk menyukseskan program wajib belajar 9 tahun melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM)
- b. Bidang Kesehatan, diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, yang meliputi layanan kesehatan dasar, layanan kesehatan rujukan dan pelayanan penunjang lainnya
- c. Bidang infrastruktur pedesaan, diarahkan pada penyediaan infrastruktur di desa-desa tertinggal (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, tambatan perahu, irigasi desa sederhana dan penyediaan listrik bagi daerah yang betul-betul memerlukan).

2. PKPS BBM Tahap II :

- a. Bantuan Langsung Tunai tanpa syarat kepada Rumah Tangga Sasaran (*unconditional cash transfer*) sebesar Rp 100.000 per bulan selama satu tahun, dan setiap tahap diberikan Rp 300.000 per tiga bulan. Sasarannya Rumah Tangga Sasaran sejumlah 19,1 juta sesuai

hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan DIPA Departemen Sosial yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan. (Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran).

Dan pada tahun 2008 pemerintah melanjutkan skema Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) guna mengatasi dampak sosial ekonomi akibat kenaikan BBM melalui tiga kluster yang terdiri dari :

a. Kluster 1, Kelompok Masyarakat "diberikan ikan".

Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, dengan sasaran Rumah Tangga Miskin melalui program Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, BOS, Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), bantuan sosial untuk korban bencana, lansia, penyandang cacat.

b. Kluster 2, Kelompok Masyarakat "diajari mancing".

Program Pemberdayaan Masyarakat, melalui Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri).

c. Kluster 3, Kelompok Masyarakat "dibantu untuk punya pancing dan perahu sendiri"

Program Penguatan Usaha Mikro dan Kecil, dilaksanakan sampai dengan April 2008, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menyalurkan dana kepada peminjam tanpa agunan. (Panduan Bagi Petugas Layanan Informasi Untuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM 2008)

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) berupa Bantuan langsung Tunai (BLT) tanpa syarat kepada rumah tangga miskin (*unconditional cash transfer*) dalam kerangka kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan sosial masyarakat ditengah melonjaknya harga barang dan jasa kebutuhan. Dasar hukum dari pelaksanaan Program BLT adalah Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran yang diterbitkan pada 14 Mei 2008.

Rumah Tangga Sasaran atau RTS adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin sesuai dengan hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE-05) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan jumlah 19,1 juta RTS. Penggantian RTS tidak menambah quota setiap desa/kelurahan. Indikator kemiskinan yang digunakan menggunakan 14 indikator identifikasi dari BPS, dan bukan merupakan variabel intervensi. Program BLT sendiri adalah subsidi berupa uang tunai sebesar Rp100.000 per bulan per-RTS yang dibayar per tri wulan kepada masyarakat miskin yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh petugas BPS.

Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP&KB) sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah (Pemda) Surakarta selalu berupaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan maskin di kota Surakarta dengan melakukan berbagai macam program. Namun, berbagai macam program yang ada dan telah dilaksanakan tersebut dinilai belum mampu meningkatkan standar kesejahteraan maskin di Kota Surakarta secara signifikan meskipun sudah ada perubahan kearah yang lebih baik.

Upaya DKRPP&KB Kota Surakarta dalam meningkatkan taraf kesejahteraan maskin di kota Surakarta salah satunya adalah dengan melaksanakan Inpres No 3 Tahun 2008 mengenai pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Untuk pembagian BLT tahun 2008 di kota Surakarta, setiap kepala keluarga akan mendapat Rp 700.000 yang diberikan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Juni sebesar Rp 300.000 dan pada tahap kedua bulan September sebesar Rp 400.000 dan pada tahun 2009, dana BLT diberikan 12 bulan penuh sebesar Rp 1.200.000. (<http://www.promojateng-pemprovjateng.com/berita.php?id=5435>, diakses 13 September 2008)

Penyaluran dana BLT di kota Surakarta juga diwarnai dengan berbagai problematika yang serupa dengan daerah lainnya di tanah air, yaitu mengenai penggunaan data BLT tahun 2005 tanpa verifikasi ulang. Padahal pada penyaluran dana BLT tahun 2005 banyak memunculkan persoalan

menyusul validitas penerima dana BLT yang dinilai kurang. Akibatnya pada saat pencairan dana BLT, banyak warga yang melancarkan aksi protes, karena berhak menerima dana BLT terkait dengan kondisi perekonomian mereka, namun tidak memperoleh dana BLT. Selain itu, terkadang ada sejumlah warga yang mengaku miskin dan berhak menerima BLT, justru lebih banyak jika dibandingkan dengan kuota BLT yang telah disalurkan. Persoalan lainnya yang mengemuka adalah adanya penerima dana BLT yang tidak memenuhi kriteria miskin seperti yang telah ditetapkan tetapi memperoleh dana BLT, sedangkan masih ada warga lain yang masuk kriteria miskin tidak memperoleh kucuran dana BLT.

Ironisnya, terdapat kelompok masyarakat yang menjual kartu BLT. Bahkan ada juga yang menjadi makelar dengan membeli kartu BLT dengan harga lebih murah daripada jumlah bantuan yang akan diterima dengan alasan tidak membutuhkan uang dan tidak mau menunggu jadwal pengucuran BLT seperti yang telah ditetapkan. Kasus lain mengenai BLT adalah adanya pemotongan dana BLT oleh sebagian aparat desa dengan alasan untuk kepentingan desa tanpa dimusyawarahkan dengan warga penerima BLT terlebih dahulu, jadi terkesan adanya pemaksaan dalam pemotongan dana BLT tersebut. Dan kasus ini terjadi di Kota Surakarta selain kasus salah sasaran. (<http://www1.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=13132>, diakses 13 September 2008)

Untuk kota Surakarta, penyaluran dana BLT menyesuaikan keputusan pemerintah pusat, dasar membagikan uang tunai tersebut adalah *data base* warga miskin 2005. Mengacu pada tahun tersebut, jumlah warga miskin Surakarta menurut data BPS sebanyak 26.483 kepala keluarga (KK). Padahal, dalam perkembangannya, jumlah keluarga miskin Surakarta sesuai surat keputusan (SK) Walikota Surakarta mencapai 29.764 KK. Jadi pada penyaluran dana BLT tahun 2008 masih banyak maskin yang tidak mendapatkan kucuran dana BLT karena menggunakan data tahun 2005,

sedangkan verifikasi ulang dilakukan pada September 2008 yang akan dijadikan sebagai acuan penyaluran BLT tahun 2009. (<http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=164210&actmenu=38>, diakses 13 September 2008).

Pada tahun 2005 jumlah penerima BLT di Surakarta 26.483 KK yang tersebar seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Penerima BLT di Kota Surakarta Tahun 2005

No	Wilayah	Jumlah Penerima BLT (per KK)
1.	Kecamatan Laweyan	4.417 KK
2.	Kecamatan Serengan	2.376 KK
3.	Kecamatan Pasar Kliwon	5.549 KK
4.	Kecamatan Jebres	6.211 KK
5.	Kecamatan Banjarsari	7.930 KK
Jumlah		26.483 KK

Sumber : (<http://www.promojateng-pemprovjateng.com/berita.php?id=5435>, diakses 13 September 2008)

Idealnya, data penerima dana BLT pada tahun ini diverifikasi ulang, sehingga seluruh warga miskin di Surakarta menerima dana BLT secara merata dan tepat sasaran. Verifikasi data ini dimaksudkan untuk memastikan jika ada warga penerima BLT yang meninggal dunia dan pengalihan penyaluran kepada ahli waris. Namun, untuk melakukan verifikasi ulang bagi BPS sebagai penyedia data dan Kantor Pos selaku penyalur dana, tidak memiliki kesempatan untuk memperbaharui data menyusul waktu yang tersedia sangatlah terbatas dan dana BLT harus segera disalurkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan jika melakukan pembaharuan data, maka penyaluran dana BLT 2008 akan tertunda. Dalam hal ini hendaknya pemerintah belajar dari sejumlah kelemahan yang terjadi pada penyaluran BLT tahun 2005 lalu, di antaranya masalah konsep penyaluran, kurangnya pemahaman masyarakat tentang program ini, kurang pengawasan dan evaluasi dari pemerintah pada penyaluran BLT serta tidak adanya

pendampingan pada penyaluran BLT tahun 2005 lalu.

Dari realita yang ada tersebut, maka Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP&KB) harus mempunyai strategi yang sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya penyimpangan dana BLT 2008. Strategi dilakukan agar program BLT menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran dalam penyalurannya, sehingga secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Dan berbagai penyimpangan yang mungkin dapat terjadi dapat diantisipasi dengan strategi yang diimplementasikan dengan tepat. Berdasarkan hal-hal diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Strategi Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP&KB) dalam Mencegah Penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 di Kota Surakarta".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan diutamakan dan ditekankan dalam penelitian ini adalah : "Bagaimanakah strategi Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP&KB) dalam mencegah terjadinya penyimpangan dana BLT 2008 di Kota Surakarta ?"

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan guna mencapai tujuan berupa :

1. Tujuan Operasional

Untuk mengetahui strategi yang digunakan DKRPP&KB dalam mencegah penyimpangan

dana BLT di Kota Surakarta.

2. Tujuan Fungsional

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi DKRPP&KB untuk melaksanakan strategi penyaluran dana BLT agar tidak terjadi penyimpangan, dan BPS agar lebih baik lagi dalam melaksanakan pendataan maskin yang berhak mendapat kucuran dana BLT agar tepat sasaran, serta Kantor Pos dalam penyaluran dana BLT.

3. Tujuan Individu

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar Kesarjanaan Strata 1 bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara program S-1 Reguler di UNS.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai Strategi Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP&KB) dalam Mencegah Penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 di Kota Surakarta diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya dapat digunakan untuk membantu bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian mengenai Strategi Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP&KB) dalam Mencegah Penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 di Kota Surakarta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengembangan dan perbaikan pelaksanaan penyaluran BLT di Kota Surakarta.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

Menurut Masri Singarimbun (1989:37), teori adalah seperangkat asumsi, konsep, kontrak, definisi, dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara menghubungkan antar konsep. Untuk mendukung dan membantu merumuskan pemikiran dalam penelitian mengenai Strategi Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP&KB) dalam Mencegah Penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Surakarta akan digunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teori-teori yang menjelaskan Strategi DKRPP&KB dalam Mencegah Penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 di Kota Surakarta tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari kata *stratego* dalam bahasa Yunani, gabungan dari *stratos* atau tentara, dan *ego* atau pemimpin (Bryson, 2007:25). Disini strategi diartikan sebagai taktik atau cara bagi seorang pemimpin perang dalam memobilisasi pasukannya untuk memenangkan peperangan. Konotasi ini berlaku selama masa perang dan berkembang dalam manajemen ketentaraan. Namun dewasa ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi, dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan, hanya saja lebih diaplikasikan sesuai dengan jenis organisasi yang menerapkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994 : 964), strategi memiliki beberapa arti yaitu siasat perang, ilmu siasat perang, tempat yang baik menurut siasat

perang, atau dapat pula diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Dilihat dari sudut etimologi, strategi diartikan sebagai kiat, cara atau taktik. Oleh karena itu, menurut Nawawi (2003:147) strategi dalam sebuah manajemen organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara, taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategis organisasi.

Pengertian strategi dikemukakan oleh para ahli seperti Argyis (1985), Mintzberg (1979), Steiner dan Miner (1977) yang mendefinisikan bahwa strategi merupakan respon-secara terus-menerus maupun adaptif-terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi (Freddy Rangkuti, 1997:4).

Definisi mengenai strategi juga dikemukakan oleh Hofer dan Schendel (1978) yang mengartikan strategi sebagai :

“..fundamental pattern of present and planned resources deployments and environmental interactions that indicates how organization will achieve its objectives”. (Tangkilisan, 2005:253).

Dari uraian diatas, Hofer dan Schendel mendefinisikan strategi sebagai pola pokok yang ditunjukkan dan pengalokasian sumber daya organisasi dan pengaruh lingkungan yang menunjukkan bagaimana organisasi berusaha mencapai tujuan. Selanjutnya Hofer dan Schendel mengajukan empat komponen strategi yang perlu dipertimbangkan, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Ruang lingkup (*scope*), yaitu ruang gerak interaksi antara organisasi atau institusi dengan lingkungan eksternalnya, baik masa kini maupun masa yang akan datang.
- 2) Pengalokasian sumber daya (*resource deployments*), yaitu pola pengalokasian sumber daya dan kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi/institusi.
- 3) Keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), yaitu posisi unik yang dikembangkan institusi/organisasi.

- 4) Sinergi, yaitu efek bersama dari pengerahan sumber daya/keputusan strategis, sehingga seluruh komponen yang ada mampu bergerak secara terpadu dan efektif.

Michael Allison dan Jude Kaye (2005:3) berpendapat bahwa strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi. Strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.

Menurut Steiner dan Miner (dalam Robson 1997:4), strategi mengacu pada formulasi, misi, tujuan, dan obyektif dasar organisasi; strategi-strategi program dan kebijakan untuk mencapainya; dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa strategi yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. (Yosal Irianta, 2004:12).

Ohmae, yang sering dijuluki “Mr. Strategy” di Jepang mengatakan bahwa strategi sebenarnya tidak lain dari suatu kerja untuk memaksimalkan kekuatan suatu pihak dalam menghadapi berbagai kekuatan di lingkungan usaha. Lingkungan ekstern itu haruslah diteliti dengan saksama, yaitu dengan memilih peluang yang tersedia untuk dapat meningkatkan peran sambil memperkecil kerugian-kerugian yang timbul dan yang mungkin timbul. (Salusu, 2004 : 91).

Sementara menurut Soejono Trimono (1984:9), strategi adalah tindakan yang dipandang paling produktif, efektif dan efisien dalam usaha mencapai tujuan, baik bagi organisasi secara keseluruhan maupun pertumbuhan dan pengembangan pribadi individu yang terlibat dalam organisasi tadi.

Strategi bagi suatu organisasi menurut Vancil dalam Salusu (2004:95) adalah konseptualisasi yang diekspresikan oleh pemimpin organisasi itu tentang (1) sasaran jangka panjang dari organisasinya; (2) kebijaksanaan dan kendala, baik yang dicetuskan sendiri oleh pemimpin itu maupun yang diperintahkan oleh atasannya yang justru

merintangi kegiatan organisasi; dan (3) seperangkat rencana yang sedang berjalan mengenai tujuan jangka pendek yang dipandang layak memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran.

Hax dan Majluf dalam Salusu (2004:100) mencoba menawarkan rumusan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut :

- 1) suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral.
- 2) menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya.
- 3) menyeleksi bidang yang akan digeluti organisasi.
- 4) mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya.
- 5) melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

Inti pokok dari definisi strategi yang dirumuskan oleh Hax dan Majluf adalah strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan kontinuitasnya yang vital, sementara pada saat yang bersamaan ia akan memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.

Salusu (2004:101) sendiri mengutarakan bahwa strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, secara umum strategi diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh manajer atau manajemen puncak untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemen-elemen di dalamnya untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Strategi adalah semua keputusan untuk melakukan perubahan dan mencapai kondisi yang diinginkan organisasi di masa depan. Sehingga organisasi harus mampu menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Dengan demikian, beberapa ciri strategi yang utama adalah :

- *Goal-directed actions*, yaitu aktivitas yang menunjukkan "apa" yang diinginkan organisasi dan "bagaimana" mengimplementasikannya.
- Mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya dan kapabilitas), serta memperhatikan peluang dan tantangan (Mudrajad Kuncoro, 2006:12).

Strategi merupakan suatu perluasan misi yang menjembatani organisasi dengan lingkungan. Oleh karena itu, strategi dikembangkan untuk mengatasi isu-isu strategi dengan cara membuat garis besar dari respon suatu organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Selain itu strategi juga merupakan pola tujuan, kebijakan program, tindakan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi tersebut, apa yang dikerjakan dan mengapa organisasi tersebut melakukannya.

Strategi dapat berhasil jika terdapat prinsip-prinsip yang dapat dijadikan indikator keberhasilan suatu strategi. Hatten dan Hatten dalam Salusu (2004:108) berpendapat bahwa terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan agar suatu strategi yang dibuat dapat berhasil, prinsip-prinsip tersebut meliputi :

- 1) Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya, dalam artian sejalan dengan lingkungan yang memberikan peluang untuk bergerak maju.
- 2) Setiap organisasi hendaknya tidak hanya membuat satu strategi saja, dan antara strategi yang satu dengan yang lainnya haruslah konsisten dan serasi.
- 3) Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain, yang dapat merugikan organisasi.

- 4) Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya, dalam artian harus mampu memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.
- 5) Sumber daya adalah sesuatu yang kritis, dalam artian sesuatu yang memang layak dan dapat dilaksanakan.
- 6) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar dan harus dapat selalu dikontrol.
- 7) Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
- 8) Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.

Suatu strategi hendaknya mampu memberikan informasi agar lebih mudah dipahami oleh setiap individu dalam suatu instansi/organisasi seperti DKRPP&KB Kota Surakarta. Menurut Donnelly dalam Salusu (2004 : 109), ada enam informasi yang tidak boleh dilupakan dalam strategi, yaitu : (1) Apa yang dilakukan; (2) Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang dipakai dalam menentukan apa diatas; (3) Siapa yang akan bertanggung jawab untuk atau mengoperasionalkan strategi; (4) Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menyukseskan strategi; (5) Berapa lama waktu yang diperlukan untuk operasionalisasi strategi tersebut; (6) Hasil apa yang diperoleh dari strategi itu.

Setiap strategi menuntut adanya suatu implementasi, karena tanpa adanya suatu implementasi, strategi menjadi tidak berarti. Implementasi strategi berfokus pada aktivitas-

aktivitas administratif yang merupakan suatu proses tersendiri dan sering tidak dipandang sebagai bagian integral dari pengambilan keputusan. Jadi, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu.

Higgins (1985) menawarkan rumusan mengenai implementasi. Dimana implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia, menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Implementasi strategi adalah proses dimana organisasi mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur, seperti yang dijabarkan dibawah ini :

- o Program yaitu pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan.
- o Anggaran yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan.
- o Prosedur yaitu sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. (J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, 2003:11)

Hunger dan Whellen menjelaskan bahwa program, anggaran dan prosedur hanyalah bentuk rencana yang disusun mendetail yang akhirnya menuju pada implemetasi yang dibuat.

Dalam *International Journal of Management Reviews (Strategy-as-practice: A*

review and future directions for the field) :

” This review has contributed to the s-as-p field in three ways. First, it has provided an overview and map of the field, based on its own terminology and issues, which has helped to better explain those terminology and issues. Second, it has exposed gaps in fulfilling the s-as-p research agenda, particularly with empirical work. Third, it has proposed alternative theoretical resources from other fields of research, which may be used to address those gaps.” (Paula Jarzabkowski and Andreas Paul Spee, 2009:90)

Dari uraian diatas menyebutkan bahwa dalam jurnal tersebut disumbangkan tiga langkah dalam hal pelaksanaan strategi. Pertama, disiapkan pandangan yang luas dan memetakan bidang, berdasarkan pada istilah dan isu. Kedua, menyingkap celah yang memenuhi agenda penelitian pelaksanaan strategi. Ketiga, dikemukakan sumber alternatif teoritis dari penelitian bidang lain, yang digunakan untuk menunjukkan celah tersebut.

Jadi, implementasi suatu strategi menuntut suatu kehati-hatian, karena menyangkut bagaimana melaksanakan strategi tersebut. Apabila strategi tersebut merupakan hasil keputusan strategis yang inkremental maka implementasinya tidak menimbulkan masalah yang terlalu banyak. Tetapi kalau merupakan keputusan yang baru ditetapkan, maka akan sulit pelaksanaannya.

Untuk menjamin bahwa strategi akan berhasil, diperlukan adanya kebijaksanaan yang berkaitan dengan pedoman pelaksanaan, metode kerja, prosedur dan peraturan-peraturan, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk memberikan dorongan dan motivasi bagi yang bersangkutan dalam menyukseskan pencapaian sasaran organisasi.

Dalam mengimplentasikan suatu strategi, biasanya sering terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Masalah mulai mengemuka, umumnya terjadi pada waktu pelaksanaannya. Permasalahan tersebut seperti koordinasi yang tidak berjalan secara efektif, pengarahan dari pimpinan unit kerja yang kadang kurang tepat sehingga eselon

bawah belum begitu paham dengan strategi yang digunakan. Dan dalam pelaksanaannya terkadang aktivitas organisasi terpengaruh oleh faktor eksternal. Masalah lain yang juga sering dihadapi adalah kualitas kepemimpinan yang kurang memadai. Selain itu, kurangnya informasi mengenai faktor yang berkaitan dengan strategi dan monitoring pada saat pelaksanaan juga menjadi penghambat suksesnya strategi yang digunakan.

Kunci sukses dari pelaksanaan strategi diungkapkan oleh Thompson dan Strickland dalam Salusu (2004:436), menyatukan organisasi secara total untuk mendukung strategi dan melihat apakah setiap tugas administratif dan aktivitas dilakukan menurut cara yang memadukan secara tepat semua persyaratan sehingga pelaksanaan dari strategi itu dapat dinikmati. Jadi, pelaksanaan strategi yang sukses membutuhkan komitmen dan dukungan yang berupa disiplin, motivasi, dan kerja keras dari pihak yang bersangkutan.

Dalam mengimplementasikan strategi, ada beberapa strategi yang dapat dipilih bagi organisasi non profit, khususnya DKRPP&KB Kota Surakarta dalam mencegah penyimpangan dana BLT 2008 di Kota Surakarta. Menurut Hadari Nawawi, strategi tersebut antara lain:

- 1) Strategi Agresif, dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) yang sifatnya mendobrak (penghalang, tantangan dan ancaman) untuk mencapai keunggulan/prestasi yang ditargetkan.
- 2) Strategi Konservatif, dilakukan dengan membuat program-program dan mengukur tindakan (*action*) dengan hati-hati serta disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.

- 3) Strategi Difensif, dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah untuk mempertahankan keunggulan prestasi yang sudah dicapai.
- 4) Strategi Kompetitif, tindakan atau program untuk mewujudkan keunggulan yang melebihi organisasi non profit lainnya yang sejenjang atau sama posisinya.
- 5) Strategi Inovatif, program-program yang dibuat atau tindakan agar organisasi non profit tampil sebagai pelopor pembaharuan dalam tugas pokoknya, sebagai keunggulan atau prestasi.
- 6) Strategi Diversifikasi, program-program dan tindakan (action) berbeda dengan apa yang telah dilakukan atau berbeda dengan organisasi lainnya dalam memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembangunan.
- 7) Strategi Prefentif, program-program yang dilakukan dan tindakan untuk memperbaiki/mengoreksi kekeliruan sebelumnya, baik yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri maupun oleh organisasi atasannya.
- 8) Strategi Reaktif, program-program atau tindakannya menunggu dan hanya memberi tanggapan jika telah diberi petunjuk/perintah, pengarahan, pedoman pelaksanaan, manajemen tidak berusaha membuat dan menetapkan program-program dan proyek secara proaktif.
- 9) Strategi Oposisi, program-program atau tindakannya bersikap menolak dan menantang/menunda pelaksanaan pengarahan, perintah, petunjuk atau bahkan mungkin peraturan perundang-undangan dari organisasi atasan, yang dinilai atau sekiranya kurang menguntungkan atau mempersulit untuk melaksanakan.

- 10) Strategi Adaptasi, strategi ini hampir sama dengan strategi defensif, yaitu melakukan adaptasi dengan organisasi lain dan menyesuaikan dengan aturan, petunjuk, pengarahannya dan pesoman dari sumber lainnya.
- 11) Strategi Ofensif, semua tindakan atau program yang berusaha memanfaatkan peluang, baik sesuai maupun tidak sesuai dengan aturan, pedoman dan pengarahannya.
- 12) Strategi Menarik Diri, dilakukan dengan kecenderungan menghindari untuk membuat program-program atau tindakan yang sesuai dengan aturan karena suatu sebab.
- 13) Strategi Kontijensi, sebagai cara pemecahan masalah yang memilih alternatif yang paling menguntungkan atau yang terbaik diantara yang terbaik, serta sesuai dengan petunjuk dan pedoman organisasi atasan dan bahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14) Strategi Pasif, membuat semua program-program dan tindakan menjalankan tugas sesuai aturan dan lebih dominan pada pelaksanaan pekerjaan tugas rutin. (Nawawi, 2003: 176-179).

Dari berbagai macam strategi diatas, maka strategi yang diterapkan DKRPP&KB Kota Surakarta dalam mencegah penyimpangan dana BLT 2008 lebih fokus pada strategi prefentif. Hal ini karena DKRPP&KB Kota Surakarta membuat dan melakukan program-program untuk memperbaiki/mengoreksi kekeliruan sebelumnya, baik yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri maupun oleh organisasi atasannya. Jadi, disini DKRPP&KB Kota Surakarta mengoreksi Program BLT 2005 kemudian berupaya memperbaiki kekeliruan yang ada agar tidak terjadi pada Program BLT 2008.

b. Strategi Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP&KB)

Berdasarkan pemaparan pengertian strategi diatas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud Strategi DKRPP&KB adalah suatu rencana besar yang berorientasi jangkauan ke masa depan yang ditetapkan sedemikian rupa. Sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya khususnya masyarakat miskin Kota Surakarta yang diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008.

c. Bantuan Langsung Tunai

Program Bantuan Langsung Tunai diselenggarakan dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial (*social protection*) sebagai dampak dari pengurangan subsidi BBM. Program seperti ini bukan yang pertama dan satu-satunya di dunia. Ada beberapa negara lain yang telah mencanangkan program semacam BLT, seperti yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Bantuan Langsung Tunai di Berbagai Negara

No	Nama Program	Sifat dan Besaran Subsidi	Negara yang Melaksanakan/ tahun
1.	<i>Progressa/ Oportunidades</i>	Conditional Cash Transfer. Bervariasi antara USD 0.50-USD 3.20 per hari per rumah tangga	Mexico, 1997
2.	<i>Bolsa Escola/ Bolsa Familia</i>	Mirip yang dilakukan di Mexico. Antara USD 0.45-USD 2.85	Brazillia, 1995
3.	<i>CSG (Child Support Grand)</i>	Pemberian uang untuk anak-anak keluarga miskin. USD 0.30 per hari dan USD 1.20 bagi penyandang	Afrika Selatan, 1998

		cacat.	
4.	MSLP, China	Rumah Tangga Miskin di daerah Urban	China., 1999
5.	<i>The Kalamo Cash Transfer Scheme, Zambia</i>	Rumah Tangga dengan cut off 10 % Rumah Tangga Termiskin	Zambia, 1999
6.	SLT/ BLT	Rumah Tangga Miskin	Indonesia, 2005

Sumber : Panduan bagi Petugas Layanan Informasi untuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBm Tahun 2008

Dalam *International Journal for Equity in Health (Social class, marginality and self-assessed health: a cross-sectional analysis of the health gradient in Mexico)* :

” In Mexico, health differentials associated with social inequalities have widened in the past two decades..... .Political participation by the lower income classes, however, has created pressures for governments to respond with supportive public policies (Navarro V, Muntaner c, Borrell C, Benach J, Quiroga A, Rodríguez-Sanz M, Verges N, Pasarín MI, Korlp W). In the early 90s, government implemented a social safety-net program, the National Solidarity Program, now *Oportunidades*, combining conditional cash transfers with health, nutrition, and education assistance. The program has tried to improve living conditions for targeted vulnerable populations in the short term, while fostering capacity development in the medium term, by creating incentives to increase school attendance and regular use of preventive health services. Despite its growing coverage, and given the magnitude of poverty, the regional distribution of the funds, as well as the political criteria to allocate resources that favoured groups with greater potential for collective action, studies suggest that this targeted design of social policy was not very effective reducing poverty during the 1990s when the survey was conducted (Székely M).” (Adolfo Martinez Valle,2009:3)

Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa :

” Di Meksiko, kesenjangan kesehatan dihubungkan dengan ketidakmerataan social berlangsung selama dua dekade ini.... Partisipasi politik kalangan berpenghasilan rendah, bagaimanapun, memaksa pemerintah untuk merespon dengan mendukung kebijakan publik. Awal 90an, pemerintah mengimplementasikan Program Jaring Pengaman Sosial, *the National Solidarity Program*, sekarang *Oportunidades*, gabungan bantuan langsung tunai bersyarat dengan kesehatan, gizi, dan bantuan kesehatan. Program ini berusaha meningkatkan kondisi taraf hidup sasaran populasi yang mudah dijangkau dalam jangka pendek, sedangkan membantu kapasitas perkembangan pembangunan jangka menengah, dengan mendorong peningkatan kehadiran sekolah dan pelayanan kesehatan yang teratur. Meskipun perkembangannya rata-rata, dan cenderung besarnya kemiskinan, penyaluran dana ke daerah, sebaik kriteria politik mengalokasikan

sumber bantuan dengan potensi yang lebih baik bagi tindakan bersama, penelitian mengusulkan bahwa target desain kebijakan sosial tidak begitu efektif mengurangi kemiskinan selama tahun 1990 ketika penelitian diadakan.”

Program Bantuan Langsung Tunai adalah berupa bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sedangkan pengertian dari RTS adalah rumah tangga yang masuk kedalam kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Mekanisme dari Program BLT bagi RTS merupakan asistensi sosial (*social assistance*) yang bertujuan :

- 1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Sasaran didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang *Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran*. Penerima bantuan langsung tunai adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak dan kondisinya yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum. Sementara Bank Dunia mendefinisikan keadaan miskin sebagai ” *Poverty is concern with absolute standard of living of part of society*

the poor in equality refers to relative living standards across the whole society ".
(Sumodiningrat, 1999:2).

Jika ditinjau dari konteks politik, John Friedman (Nurhadi, 2007:13) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuatan yang meliputi: (a) modal produktif atau asset, (b) sumber keuangan, (c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang dan jasa, (e) pengetahuan dan ketrampilan, (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

Salah satu teori yang terkenal dalam memahami kemiskinan adalah *deprivation trap* (jebakan kemiskinan) yang diusung oleh Robert Chambers (dalam Nurhadi, 2007:31), diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kemiskinan (*property proper*)
- 2) Kelemahan Fisik (*physical weaknes*)
- 3) Isolasi (*isolation*)
- 4) Kerentanan atau kerawanan (*vulnerability to contingencies*)
- 5) Ketidakberdayaan (*powerlessness*)

Dalam pelaksanaan penyaluran dana BLT, pemerintah menetapkan 14 kriteria bagi penerima BLT, antara lain :

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m² per orang.
- 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.

- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama-sama dengan orang lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai dan air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah.
- 8) Hanya mengonsumsi daging, susu, ayam satu kali dalam seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian dalam satu tahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 hektar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnyadengan pendapatan dibawah Rp. 600.000 per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD atai hanya SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual minimal Rp. 500.000 seperti sepeda motor baik kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

2. Kerangka Pemikiran

Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP&KB) Kota Surakarta merupakan salah satu instansi daerah yang memiliki kompetensi di bidang kesejahteraan sosial masyarakat khususnya di Kota Surakarta. Hal ini

mengingat perannya sebagai badan daerah yang mempunyai tugas di bidang urusan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta. Keberhasilan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial akan membawa pada terangkatnya derajat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik pula. Sedangkan kegagalan dalam bidang pembangunan kesejahteraan akan membawa dampak kekecewaan pada masyarakat khususnya masyarakat miskin, apalagi kesejahteraan yang dimaksud adalah menyangkut penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta.

DKRPP&KB Kota Surakarta harus mengetahui secara pasti tentang kebutuhan masyarakat miskin Kota Surakarta. Untuk mengetahui kebutuhan masyarakat miskin, DKRPP&KB Kota Surakarta dapat memanfaatkan data-data yang ada tiap kecamatan, RT/RW, Badan Pusat Statistik (BPS), serta sumber-sumber lain yang bisa dipakai untuk mengetahui kebutuhan masyarakat miskin di bidang kesejahteraan di Kota Surakarta.

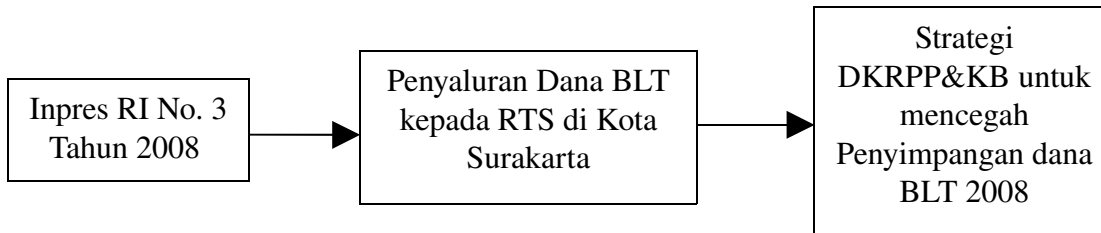
Setelah mengetahui kebutuhan masyarakat miskin dalam meningkatkan derajat kesejahterannya, maka DKRPP&KB Kota Surakarta berusaha sebaik mungkin melaksanakan program sosial kepada masyarakat miskin khususnya berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin di Kota Surakarta. Dalam melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang *Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran*, DKRPP&KB dituntut kinerjanya agar tidak terjadi penyimpangan dana dalam penyaluran BLT. Oleh karena itu, DKRPP&KB harus menggunakan strategi yang mampu mencegah penyimpangan dana BLT. Dan implementasi dari strategi DKRPP&KB tersebut adalah sebagai wujud optimalisasi penyaluran dana BLT kepada RTS agar lebih efektif dan menysasar.

Secara singkat kerangka pikir bagi penelitian ini dapat digambarkan dengan skema

sebagai berikut :

Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran Penelitian



F. Definisi Konseptual dan Defenisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dibuat dengan menjelaskan konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dengan tujuan untuk menghindari persepsi antara peneliti dengan pembaca. Untuk itu dalam penelitian ini akan digunakan beberapa definisi konseptual guna menjelaskan varibel-variabel di dalamnya, antara lain :

a. Strategi DKRPP&KB Kota Surakarta

Strategi DKRPP&KB Kota Surakarta merupakan suatu kiat, cara, taktik utama yang dirancang secara sistematis oleh DKRPP&KB Kota Surakarta dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategis organisasi.

b. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) diartikan sebagai bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang masuk kedalam kategori

rumah tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskin.

c. Strategi DKRPP&KB Kota Surakarta dalam mencegah penyimpangan dana BLT di Kota Surakarta.

Strategi DKRPP&KB dalam mencegah penyimpangan dana BLT di Kota Surakarta adalah kiat, cara, taktik utama yang dirancang secara sistematis oleh DKRPP&KB Kota Surakarta dalam melaksanakan penyaluran dana BLT kepada masyarakat miskin di Kota Surakarta. Dan yang menjadi fokus utama dari strategi tersebut adalah agar tidak terjadi penyimpangan dana BLT 2008, sehingga masyarakat miskin yang menerima dana BLT dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dimaksudkan agar daya beli masyarakat miskin meningkat sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan harga di pasar.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat dengan tujuan menjelaskan apa yang menjadi fokus penelitian. Menurut Masri Singarimbun dan Soffian Effendi (1989:46) definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimanakah caranya mengukur suatu variabel penelitian. Jadi definisi operasional ini merupakan konsep yang telah disesuaikan derajatnya dengan situasi dan kondisi ditempat penelitian.

Oleh karena itu, konsep Strategi DKRPP&KB Kota Surakarta dalam mencegah penyimpangan dana BLT di Kota Surakarta dapat dioperasionalkan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program BLT dan Permasalahannya.

Mengenai pelaksanaan Program BLT di Kota Surakarta dan mencuatnya permasalahan yang muncul selama penyaluran BLT. Permasalahannya berupa penyimpangan dana BLT yang terjadi di Kota Surakarta seperti salah sasaran dan pemotongan dana BLT oleh

aparatus setempat.

- b. Strategi DKRPP&KB dalam Mencegah Terjadinya Penyimpangan Dana BLT 2008 Di Kota Surakarta.

Dalam hal ini, DKRPP&KB menentukan strategi apa saja yang digunakan dalam mencegah terjadinya penyimpangan dana BLT 2008 di Kota Surakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 1997:6).

Hal ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Irawan Soehartono (1998:35), penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), dan data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai Prosedur Pelaksanaan dana BLT yang diwarnai dengan penyimpangan dana dalam penyalurannya kepada masyarakat miskin.

Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini juga akan dideskripsikan bagaimana strategi DKRPP&KB Kota Surakarta dalam mencegah penyimpangan dana BLT di Kota Surakarta dan faktor-faktor yang menghambat strategi yang digunakan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Surakarta, khususnya DKRPP&KB Kota Surakarta yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Surakarta Kode Pos 57111. Peneliti memilih DKRPP&KB Kota Surakarta sebagai tempat penelitian karena merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program BLT dan merupakan badan yang mempunyai kompetensi di bidang urusan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.

3. Jenis Data

Data merupakan fakta atau keterangan dari objek yang diteliti. Data yang diperlukan adalah data yang mendukung dengan penelitian ini. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data pertama untuk tujuan penelitian yang dilakukan dan mendapat hasil sebenarnya pada objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian BLT ini diperoleh langsung dari sumber pertama melalui kepala/staff/pegawai DKRPP&KB Kota Surakarta maupun organisasi lain yang terlibat dalam penyaluran dana BLT 2008 dan masyarakat miskin yang mendapat BLT di Kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, peraturan perundang-

undangan, dan melalui media internet yang berkaitan dengan strategi, DKRPP&KB Kota Surakarta, dan program BLT.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif, maka teknik pengambilan sampel dilakukan secara selektif dengan menggunakan pertimbangan teoritis, keingintahuan pribadi, karakteristik empiris, dan kebutuhan maupun tujuan penelitian strategi DKRPP&KB dalam mencegah penyimpangan dana BLT di Kota Surakarta ini. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penarikan sampel *purposive sampling* yang masuk dalam kategori *non probability sampling*. Oleh karena itu, peneliti tidak memberikan kesempatan yang sama pada populasi sampel yang ada, dimana peneliti cenderung menggunakan atau memilih informan yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui permasalahan seputar strategi dari DKRPP&KB dalam mencegah penyimpangan dana BLT di Kota Surakarta secara lengkap. (HB Sutopo, 2002:56).

5. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Susanto, 2006:126). Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan (lokasi penelitian). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi *non partisipan* dimana peneliti hanya melakukan pengamatan mengenai fenomena-fenomena

yang diteliti dengan tidak ikut dalam peristiwa atau kegiatan yang diamati secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (penulis) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam/ *tape recorder* (Irawan Soehartono, 1998:67). Untuk mempermudah dalam proses wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang memuat garis-garis pokok pertanyaan, dan apabila dianggap perlu, peneliti dapat mengajukan pertanyaan diluar pedoman wawancara tersebut.

Dalam penelitian mengenai strategi DKRPP&KB dalam mencegah penyimpangan dana BLT di Kota Surakarta ini, teknik wawancara akan dilakukan kepada Kepala Kantor/Staff/Pegawai DKRPP&KB Kota Surakarta dan masyarakat miskin dalam Program BLT Kota Surakarta untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Susanto, 2006:136). Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian, yaitu DKRPP&KB Kota Surakarta dan Program BLT.

6. Validitas Data

Validitas data akan menjadi bukti kebenaran bahwa apa yang diteliti sama dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada lokasi penelitian. Agar validitas data dalam penelitian ini benar-benar terjamin, penelitian ini menggunakan triangulasi data. Teknik triangulasi data

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan data sebagai bahan pembandingan terhadap data itu (Lexy J Moelong, 1998:178). Trianggulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Trianggulasi data ini dapat ditempuh dengan cara :

H. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

I. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi

J. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen

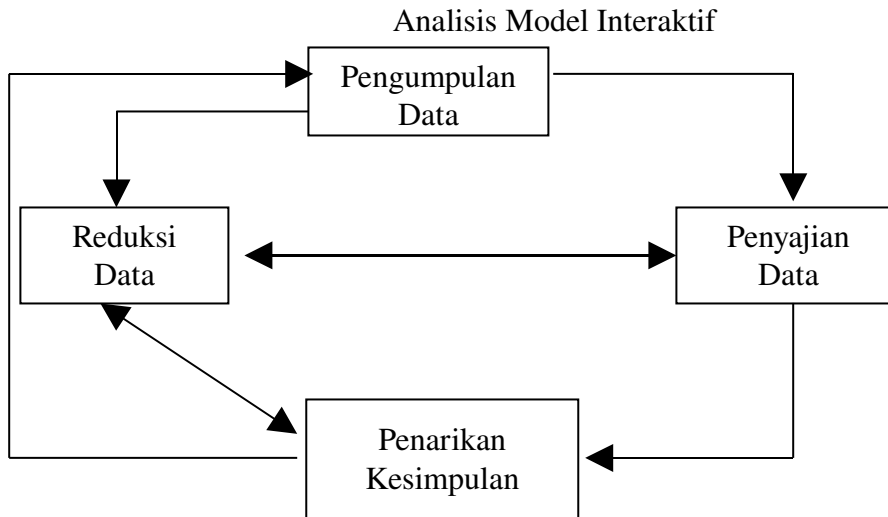
K. Membandingkan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu dengan situasi pengamatan/ penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang terkumpul sebagian besar adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran khusus yang bersifat menyeluruh tentang apa saja yang tercakup dalam permasalahan yang dilakukan di lapangan pada waktu pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis data yang dianggap lebih relevan adalah dengan menggunakan model analisis interaktif yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (HB Sutopo, 2000:91).

Dalam analisis model interaktif ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Antara ketiga hal tersebut sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, atau sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang dimaksudkan untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Sedangkan analisis model interaktif dijelaskan dalam gambar berikut :

Gambar 1.2



Sumber : HB Sutopo 2000: 96

Analisis model interaktif sebagaimana digambarkan di atas terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Proses pengumpulan data yang telah dikumpulkan dalam aneka cara (observasi, wawancara dan dokumentasi)
- b. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Adapun reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek berorientasi kualitatif berlangsung
- c. Proses penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu sebagai bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.

BAB II

DESKRIPSI LOKASI

A. Keadaan Umum Kota Surakarta

1. Kondisi Geografi Kota Surakarta

Kota Surakarta yang lebih terkenal dengan Kota Solo, mempunyai luas wilayah sekitar 44,04 km². Wilayah Kota Surakarta terletak di tengah-tengah antara wilayah pendukung yang cukup potensial, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan Klaten. Kota Surakarta terletak pada dataran rendah yang berada pada pertemuan Sungai Pepe, Jenes, dan Bengawan Solo yang mempunyai ketinggian kurang dari 92 meter dari permukaan air laut, dan terletak secara astronomi antara 110° 45” 15- 110° 45” 35 BT dan 7° 56” 00 LS. Batas-batas wilayah Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur: Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.

2. Kondisi Demografis Kota Surakarta

Berkaitan dengan Program Bantuan langsung Tunai (BLT) Kota Surakarta, perlu ditetapkan jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta yang menjadi fokus utama dari pelaksanaan Program BLT di Kota Surakarta. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 470/36/1/2007 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2007 menentukan penduduk miskin Kota Surakarta berdasarkan atas pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Keluarga Miskin di Kota Surakarta Tahun 2007

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Miskin
1	Laweyan	25.814	4.407
2	Serengan	13.579	2.372
3	Banjarsari	40.255	6.812
4	Pasar Kliwon	20.686	5.296
5	Jebres	32.408	6.230
Total		132.408	25.117

Sumber : Keputusan Walikota Surakarta Nomor 470/36/1/2007 tanggal 2 April 2007

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Jumlah Keluarga Miskin di Kota Surakarta adalah sebesar 25.117 keluarga. Jumlah keluarga miskin terbanyak terdapat di Kecamatan Banjarsari, yaitu sebesar 6.812 keluarga. Kemudian disusul oleh kecamatan Jebres dengan jumlah keluarga miskin sebesar 6.230 keluarga. Kecamatan Pasar Kliwon menempati urutan ketiga, dengan jumlah keluarga miskin sebesar 5.296 keluarga, dan urutan keempat adalah Kecamatan Laweyan sebesar 4.407 keluarga. Sedangkan jumlah keluarga miskin yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Serengan yaitu sebesar 2.372 keluarga.

B. Gambaran Umum Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1. Sejarah Berdirinya DKRPP&KB Kota Surakarta

Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta merupakan penggabungan dari empat instansi yang pada era sebelumnya terdapat kebijakan otonomi daerah berdiri sendiri-sendiri, keempat instansi tersebut adalah :

1. Dinas Kesejahteraan Rakyat (Dinkesra)
2. Dinas Sosial (Dinsos)
3. Kantor Pembangunan Desa (Bangdes)
4. Kantor Keluarga Berencana (KB)

Dengan ditetapkannya Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka penggabungan dari ketiga instansi (Dinkesra, Dinsos, Bangdes) tersebut dinamakan Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan.

Melihat perkembangan jaman, kebijakan otonomi daerah dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka Kantor Keluarga Berencana bergabung dengan Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan, sehingga nama dinas ini menjadi Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP&KB) Kota Surakarta.

2. Dasar Hukum

Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 dan Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 12 Tahun 2004 Tanggal 15 Juli 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi)

Pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan yang mengacu pada pemberdayaan masyarakat yang mengandung arti bahwa pelaksanaan kegiatan oleh warga masyarakat untuk warga masyarakat itu sendiri, maka pelaksanaan tugas-tugas tersebut menempatkan diri pada posisi sebagai pembinaan dan memotivasi warga masyarakat sehingga warga masyarakat mempunyai kepedulian sosial, berpartisipasi dan mempunyai peran aktif terhadap pelaksanaan pembangunan.

4. Visi

Dalam melaksanakan dan mencapai keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Kota Surakarta, maka Visi dari Dinas Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta adalah “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Dalam Keluarga Dan Masyarakat Yang Mampu, Mandiri Dan Sejahtera”.

5. Misi

Guna mencapai keberhasilan dari Visi tersebut, maka misi – misi yang dilakukan Dinas Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

L. Tersusunnya data yang akurat di bidang kemasyarakatan guna memberikan informasi yang lengkap dalam upaya mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

M. Mendorong peningkatan peran masyarakat untuk ikut serta bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

N. Menjalin kemitraan secara sinergis dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang bergerak dibidang kemasyarakatan.

6. Rencana Kerja

Untuk melaksanakan visi dan misi Dinas Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Maka untuk mewujudkannya ditetapkan rencana kerja tahun 2008, antara lain :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari program :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan.
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- f. Penyediaan alat tulis kantor.
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- i. Penyediaan makanan dan minuman.
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- k. Penyediaan jasa tenaga honorer/THL.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari program :
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala mebeler.
3. Program peningkatan disiplin aparatur, berupa program pengadaan mesin/kartu absensi.
4. Program pengembangan perumahan, terdiri dari program :
 - a. Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.
 - b. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan.
5. Program lingkungan sehat perumahan, berupa program penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan.
6. Program pengelolaan areal pemakaman, berupa program pemeliharaan sarana dan prasaana pemakaman.
7. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, terdiri dari program :
 - a. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.
 - c. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

8. Program penguatan kelembagaan pengaruh utama gender dan anak, terdiri dari program :
 - a. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.
 - b. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
 - c. Pengembangan sistem informasi gender dan anak..
9. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, terdiri dari program :
 - a. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah.
 - b. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT.
 - c. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan.
 - d. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT.
 - e. Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat.
 - f. Fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
10. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, terdiri dari program :
 - d. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender.
 - e. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
 - f. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.
11. Program keluarga berencana, terdiri dari program :

- vii. Pelayanan KIE
 - viii. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu.
 - ix. Promosi pelayanan Khiba.
 - x. Pembinaan keluarga berencana.
12. Program kesehatan reproduksi remaja, terdiri dari program :
- a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR).
 - b. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat.
13. Program pelayanan kontrasepsi, terdiri dari program :
- a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.
 - b. Pengadaan alat kontrasepsi.
 - c. Pelayanan KB medis operasi.
14. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, berupa program fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.
15. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat, berupa program penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.
16. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR, terdiri dari program :
- d. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR.
 - e. Fasilitas forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar

sekolah.

17. Program pengembangan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, berupa program pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
18. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, berupa program pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan.
19. Program pengembangan BKB-Posyandu-PADU, berupa program pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.
20. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terdiri dari program :
 - a. Peningkatan kemampuan (*Capacity Building*) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - b. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.
 - c. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
21. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, terdiri dari program :
 - a. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
 - b. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan anak cacatn dan anak nakal.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

sosial bagi PMKS.

- d. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
22. Program pembinaan anak terlantar, berupa program pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.
 23. Program pembinaan penyandang cacat dan trauma, terdiri dari program :
 - a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.
 - b. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.
 24. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), berupa program pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.
 25. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, berupa program peningkatan kualita SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
 26. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, berupa program pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.
 27. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, terdiri dari program :
 - a. Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa.
 - b. Pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan.
 - c. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha kecil dan menengah di pedesaan.
 28. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, berupa program pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa.
 29. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah, berupa program penyusunan dan

pengumpulan data dan statistik desa.

7. **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana Kota Surakarta meliputi :

C. Kepala Dinas

D. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian

b. Sub Dinas Keuangan

E. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan

b. Seksi Pengendalian Evaluasi dan pelaporan

F. Sub Dinas Pelayanan Rehabilitasi dan Bantuan terdiri dari :

a. Seksi Kesejahteraan dan Bantuan

b. Seksi Rehabilitasi

G. Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat terdiri dari :

a. Seksi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan

b. Seksi Kelembagaan Masyarakat

H. Sub Dinas Keluarga Berencana terdiri dari :

a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi

b. Seksi Keluarga sejahtera dan Usaha Ekonomi

I. Unit Pelaksanaan Teknis terdiri dari :

b. Unit Pelaksana Teknis Panti Asuhan pardi Yoga

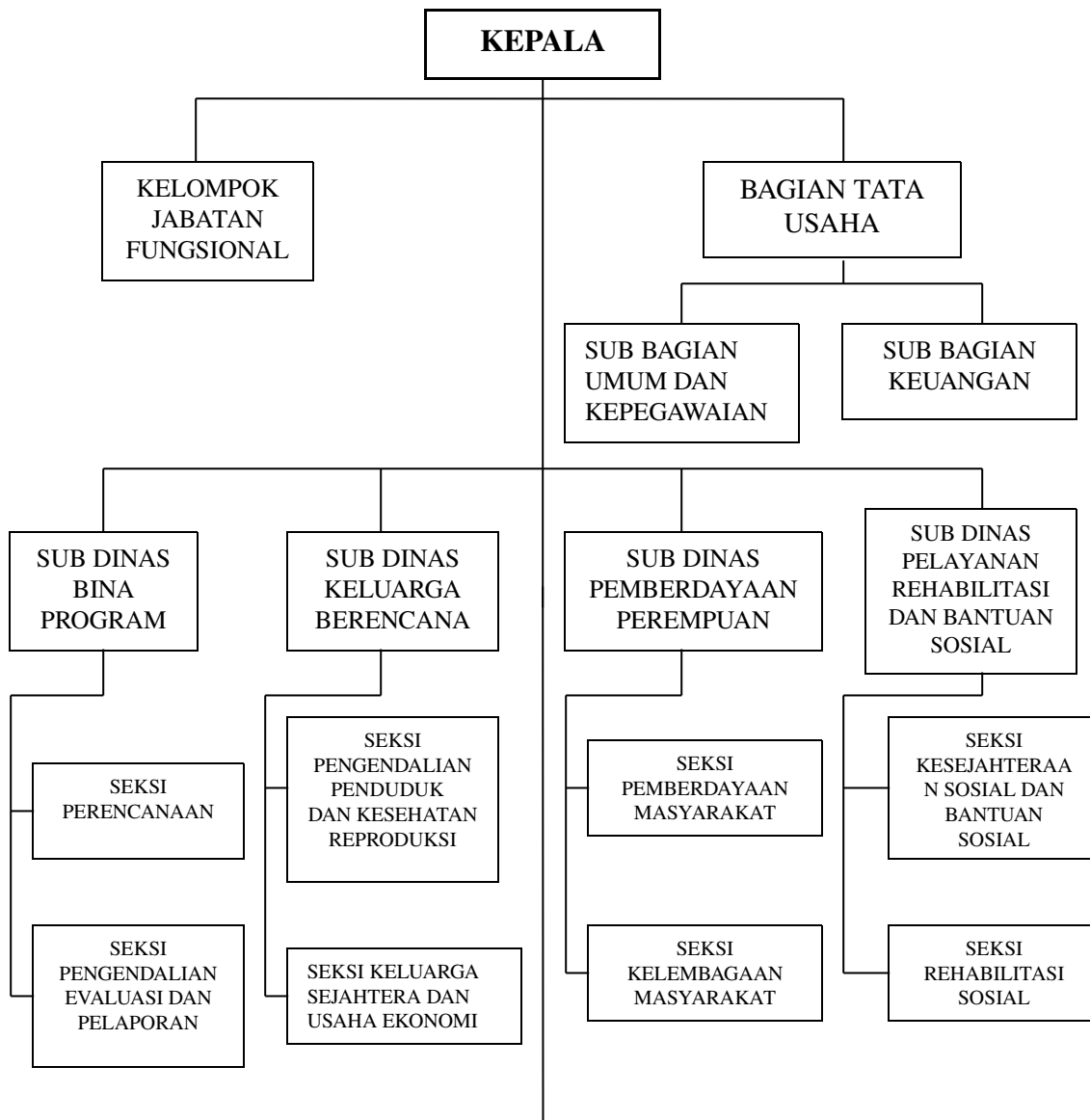
c. Unit Pelaksana Teknis Panti Wredha Dharma Bhakti

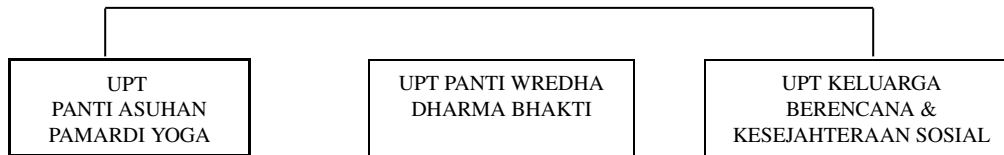
d. Unit Pelaksana Teknis Kesejahteraan dan Keluarga Berencana

Berdasarkan susunan organisasi diatas, maka gambar struktur organisasi Dinas Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Gambar Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta





Sumber : DKRPP&KB Kota Surakarta

Dari gambar struktur organisasi diatas, uraian tugas DKRPP&KB sesuai dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas DKRPP&KB adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

2. Bagian Tata Usaha

Kepala bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta administrasi perijinan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, perjalanan dinas, rumah tangga, administrasi perijinan, pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapannya, hubungan masyarakat, sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

- b. Sub Dinas Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

3. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

Kepala Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas, monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub dinas Bina Program terdiri dari :

2. Seksi Perencanaan

Kepala Seksi Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas.

3. Seksi Pengendalian Evaluasi dan pelaporan

Kepala Seksi Pengendalian Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisa dan evaluasi data serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas

4. Sub Dinas Pelayanan Rehabilitasi dan Bantuan

Kepala Sub Dinas Pelayanan Rehabilitasi dan Bantuan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan yang meliputi bina kesejahteraan, rehabilitasi, bantuan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan Kepala Dinas. Sub Dinas Pelayanan Rehabilitasi dan Bantuan terdiri dari :

a. Seksi Kesejahteraan dan Bantuan

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Bantuan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan bantuan.

b. Seksi Rehabilitasi

Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi.

5. Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan dan masyarakat sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat terdiri dari :

C. Seksi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan

Kepala Seksi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan.

D. Seksi Kelembagaan Masyarakat

Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat.

6. Sub Dinas Keluarga Berencana

Kepala Sub Dinas Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan Keluarga berencana meliputi pengendalian penduduk dan kesehatan reproduksi serta pengembangan keluarga sejahtera dan usaha ekonomi sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Keluarga Berencana terdiri dari :

B. Seksi Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi

Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

C. Seksi Keluarga sejahtera dan Usaha Ekonomi

Kepala Seksi Keluarga Berencana dan Usaha Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengembangan usaha ekonomi keluarga.

7. Unit Pelaksanaan Teknis terdiri dari :

a. Unit Pelaksana Teknis Panti Asuhan Pamardi Yoga

Kepala Unit Pelaksana Teknis Panti Asuhan Pamardi Yoga mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis penyelenggaraan Panti Asuhan Pamardi Yoga yang meliputi tugas-tugas penerimaan, pengasuhan, pelayanan, penempatan dan pembinaan lanjut sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

b. Unit Pelaksana Teknis Panti Wredha Dharma Bhakti

Kepala Unit Pelaksana Teknis Panti Wredha Dharma Bhakti mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis penyelenggaraan Panti Wredha Dharma Bhakti yang meliputi tugas-tugas penerimaan, pengasuhan, pelayanan, penempatan dan pembinaan lanjut sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

c. Unit Pelaksana Teknis Kesejahteraan dan Keluarga Berencana

Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesejahteraan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis dibidang kesejahteraan dan keluarga berencana yang meliputi tugas-tugas koordinasi dan bimbingan pengendalian penduduk.

8. **Keadaan Pegawai DKRPP&KB Kota Surakarta**

Suatu organisasi akan dapat berjalan dan bekerja dengan baik apabila didukung oleh sumber daya manusianya. Untuk memperlancar kegiatan organisasi dibutuhkan pegawai yang dapat mendukung seluruh proses kegiatan organisasi. Begitu juga DKRPP&KB yang dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari peranan dan aktivitas pegawainya yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan maupun keahlian yang dimiliki. Berikut sajian tabel identifikasi pegawai KRPP&KB Kota Surakarta berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai DKRPP&KB Berdasarkan Tingkat Pendidikannya

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	S 2	12	11,01 %
2.	S 1	40	36,70 %
3.	D III & D I	9	8,26 %
4.	SLTA	41	37,61 %
5.	SLTP	4	3,67 %
6.	SD	3	2,75 %
	Total	109	100 %

Sumber : TU DKRPP&KB Kota Surakarta

Dari data tabel 2.2 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai DKRPP&KB Kota Surakarta memiliki tingkat pendidikan SLTA dan S 1. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia DKRPP&KB Kota Surakarta cukup memadai.

Berikut juga disajikan tabel identifikasi jumlah pegawai DKRPP&KB berdasarkan pangkat dan golongannya

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai DKRPP&KB Berdasarkan Pangkat dan Golongannya

No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah	Prosentase
-----	----------------------	--------	------------

1.	IV	16	14,68 %
2.	III	75	68,81 %
3.	II	18	16,51 %
4.	I	--	
	Total	109	100 %

Sumber : TU DKRPP&KB Kota Surakarta

Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai DKRPP&KB Kota Surakarta memiliki jenjang pangkat atau golongan III, yaitu sebanyak 75 orang atau sekitar 68,81 % dari jumlah keseluruhan pegawai.

9. **Program Bantuan Langsung Tunai**

Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin agar kesejahteraan hidupnya dapat bertahan selama kenaikan harga BBM. Di Kota Surakarta sendiri, masyarakat miskin yang menerima BLT tidaklah sedikit. Masyarakat miskin yang layak mendapatkan dana BLT biasanya menerima Kartu Kompensasi BBM (KKB), yaitu kartu identitas penerima kompensasi subsidi BBM yang berisikan data penerima untuk keperluan penarikan. Berikut data jumlah rumah tangga miskin di Kota Surakarta yang menerima KKB.

Tabel 2.4

Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang Menerima KKB
Di Kota Surakarta Tahun 2008

No	Kecamatan	Rumah Tangga Miskin (KKB Tahap I)	Rumah Tangga Miskin (KKB Tahap II)	Jumlah Rumah Tangga Miskin
1.	Laweyan	3.743	674	4.417
2.	Serengan	1.929	447	2.376
3.	Banjarsari	6.497	1433	7.930
4.	Pasar Kliwon	4.481	1068	5.549
5.	Jebres	5.151	1060	6.211
Total		21.801	4.682	26.483

Sumber : BPS Kota Surakarta

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat miskin yang mendapat dana BLT di Kota Surakarta, di Kecamatan Banjarsari jumlah penerima dana BLT 2008 adalah yang paling besar yaitu sebesar 7.930 rumah tangga miskin. Dan yang kedua adalah Kecamatan Jebres, yaitu sebesar 6.211 rumah tangga miskin. Kemudian yang ketiga adalah Kecamatan Pasar Kliwon, yaitu sebesar 5.549 rumah tangga miskin. Di urutan keempat adalah Kecamatan Laweyan sebesar 4.417 rumah tangga miskin. Sedangkan di Kecamatan Serengan, rumah tangga miskin yang menerima dana BLT 2008 paling sedikit, yaitu sebesar 2.376 rumah tangga miskin.

Di kota Surakarta, pembagian BLT tahun 2008 diberikan dalam dua tahap. Pembagian BLT 2008 tahap pertama yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juni baru dilaksanakan pada bulan Juli, dana BLT yang diberikan sebesar Rp. 300.000. Sedangkan pembagian BLT pada tahap kedua dilaksanakan pada bulan September dengan dana yang diberikan sebesar Rp. 400.000. Total dana BLT yang diberikan kepada RTS selama tahun 2008 adalah Rp.700.000.

(http://www.promojateng_pemprovjateng.com/berita.php?id=5435, diakses 13 September 2008)

Di Kota Surakarta pengambilan BLT disebar di beberapa titik, hal ini untuk memudahkan kepada masyarakat dalam mengambil bantuan tersebut dan juga untuk menghindari warga saling berdesak-desakan. Titik penyaluran tersebut diantaranya Kantor Kecamatan Jebres, Kelurahan Pucangsawit, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Mojosongo. Kantor Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Gilingan, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Kadipiro, Kelurahan Tipes, Kelurahan Joyotakan.

Di Kota Surakarta, pelayanan BLT bagi orang sakit, jompo dan tuna netra tidak perlu datang ke loket pembayaran. Mereka hanya cukup menunggu di rumah, karena akan ada petugas yang mengantarkannya. Tetapi, proses pembayaran dengan cara diantar ini dilakukan setelah waktu pembayaran utama. Tentu saja, ini bisa dilakukan kalau pengurus RT di masing-masing wilayah telah mendata warganya yang sakit, jompo, tuna netra dan melaporkannya kepada pihak Kantor Pos selaku instansi yang bertugas menyalurkan dana BLT kepada RTS. Tetapi, kalau sudah terlanjur datang ke loket pembayaran, orang jompo tidak diharuskan mengantri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan tentang strategi Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP&KB) dalam mencegah terjadinya penyimpangan dana BLT 2008 di Kota Surakarta. Namun sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelaksanaan Program BLT dan permasalahan yang ada pada penyaluran Program BLT.

D. Pelaksanaan Program BLT dan Permasalahannya

Program BLT merupakan bagian dari Program Pemerintah dalam Program Penanggulangan Kemiskinan yang terbagi ke dalam tiga kluster seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Program ini dimulai pada tahun 2005 seiring kenaikan harga BBM. Dimana subsidi BBM dialihkan ke dana bantuan bagi masyarakat miskin agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya ditengah meroketnya harga-harga kebutuhan. Hal tersebut sebagaimana telah diutarakan oleh Ibu Dra. Hermiawati, selaku Kepala Bagian Sosial BPS Kota Surakarta, yang mengatakan :

“... 1 okt 2005 subsidi pemerintah terhadap BBM dihapus, maka uang subsidi dialihkan ke warga miskin, warga mana yang mau diberikan,

BPS melakukan pendataan kemudian pemberian subsidi itu disebut BLT. Tujuan utama BLT itu ya pengentasan kemiskinan. Dasar hukum dari BLT itu Inpres No 3 tahun 2008 mbak. ”

(Wawancara tanggal 16 Februari 2009)

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Ibu Dra. Titik Budi Rahayu, Msi selaku Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta, yang mengatakan sebagai berikut :

“ BLT itu sebetulnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM. Dasarnya itu Inpres no 3 tahun 2008. Kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi kenaikan BBM tadi dengan salah satunya BLT, tetapi tidak hanya BLT saja, masih ada BOS, jamkesmas. Jadi, BLT melengkapi program yang lain”. (Wawancara tanggal 4 Februari 2009).

Pelaksanaan Penyaluran dana BLT kepada RTS melalui tahapan dan mekanisme yang berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyaluran BLT kepada RTS sesuai dengan Inpres No 3 Tahun 2008. Berikut ini akan diutarakan mengenai mekanisme dan tahapan kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dana BLT 2008 kepada RTS, yaitu :

- 15) Sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai, dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Sosial, bersama dengan Kementerian/ Lembaga di Pusat bersama-sama Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Aparat Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang Taruna, Kader Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- 16) Penyiapan data Rumah Tangga Sasaran dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS Pusat). Daftar nama dan alamat yang telah tersedia disimpan dalam sistem database BPS, Departemen Sosial dan PT Pos Indonesia.

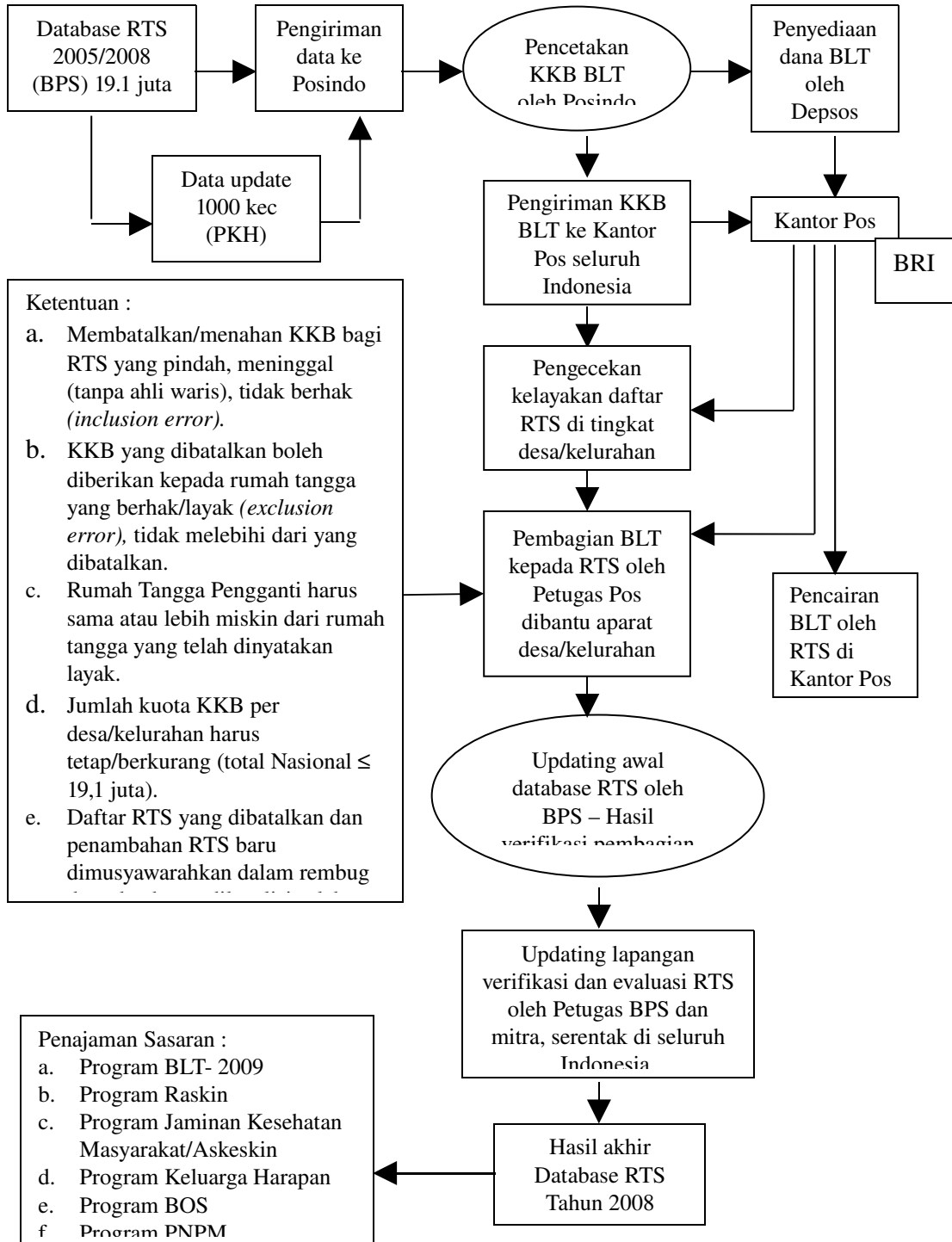
- 17) Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran dari BPS Pusat ke PT Pos Indonesia.
- 18) Pencetakan KKB Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran (KKB) berdasarkan data yang diterima oleh PT Pos Indonesia.
- 19) Penandatanganan KKB oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- 20) Pengiriman KKB ke Kantor Pos seluruh Indonesia
- 21) Pengecekan kelayakan daftar Rumah Tangga Sasaran di tingkat Desa/ Kelurahan.
- 22) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan menerima BLT, sehingga dimasukkan sebagai Rumah Tangga Sasaran yang masuk dalam daftar.
- 23) Pembagian KKB kepada Rumah Tangga Sasaran oleh Petugas Kantor Pos dibantu aparat desa/ kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, serta aparat keamanan setempat jika diperlukan.
- 24) Pencairan BLT oleh Rumah Tangga Sasaran berdasarkan KKB di Kantor Pos atau di lokasi-lokasi pembayaran yang telah ditetapkan. Terhadap KKB Penerima dilakukan pencocokan dengan Daftar Penerima (Dapem), yang kemudian dikenal sebagai KKB Duplikat.
- 25) Pembayaran terhadap penerima KKB dilakukan untuk periode Juni s.d Agustus sebesar Rp. 300.000, dan periode September s.d Desember sebesar Rp. 400.000. Penjadwalan pembayaran pada setiap periode menjadi kewenangan dari PT. Pos Indonesia.

- 26) Jika kondisi penerima KKB tidak memiliki identitas sebagai persyaratan kelengkapan verifikasi proses bayar, maka proses bayar dilakukan dengan verifikasi bukti diri yang sah (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Kelurahan, dll).
- 27) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT oleh tim terpadu.
- 28) Pelaporan bulanan oleh PT. Pos Indonesia kepada Departemen Sosial.

Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-RTS 2008, akan dilaksanakan pemutakhiran data (*updating*) terhadap data Rumah Tangga Sasaran oleh BPS dan mitra yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Hasil pemutakhiran data tersebut akan digunakan untuk penajaman sasaran Program BLT-RTS tahun 2009, Program Raskin, Program BOS, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dengan demikian, pada masa yang akan datang akan tercipta sistem database kemiskinan yang terpadu dan lintas sektor dengan target sasaran yang sama untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, keberlanjutan dan keterpaduan penanggulangan kemiskinan.

Untuk memperjelas prosedur penyaluran dana BLT 2008, berikut ini digambarkan prosedur penyaluran dana BLT 2008 kepada masyarakat miskin :

Gambar 3.1
Skema Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS)



Sumber : BPS Kota Surakarta

Pada prosedur penyaluran BLT kepada RTS diatas, DKRPP&KB Kota Surakarta berperan memonitoring jalannya penyaluran BLT di Kota Surakarta. Selain itu, DKRPP&KB Kota Surakarta juga mengelola Unit Pelaksana Program BLT (UPP-BLT) dan melakukan pembinaan supervisi serta

pengawasan terhadap pelaksanaan BLT. Sehingga apabila dalam pelaksanaan Program BLT timbul permasalahan, maka dapat segera diketahui dengan adanya monitoring Program BLT. Dan pada saat pembayaran BLT, DKRPP&KB Kota Surakarta melakukan pendampingan dan membantu Kantor Pos dengan memberikan perlindungan khusus bagi penyandang cacat, ibu hamil atau lanjut usia.

6) **Tahap Sosialisasi dan Pendataan**

Sebelum pelaksanaan Program BLT, DKRPP&KB Kota Surakarta terlebih dahulu mensosialisasikan program tersebut di tingkat kota dengan camat, kemudian camat meneruskan sosialisasi ke tingkat kelurahan dengan mengundang tokoh masyarakat yang kemudian disampaikan kepada masyarakat. Hal tersebut dikemukakan oleh Ibu Dra. Titik Budi Rahayu, Msi selaku Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta, yang mengatakan sebagai berikut :

“...Ada sosialisasi, ada rapat koordinasi tingkat kota yang melibatkan camat-camat, nah kemudian camat mensosialisasikan kepada masyarakat lewat rapat di tingkat kecamatan. Kecamatan kemudian ke kelurahan, dan kelurahan mensosialisasikan kepada tokoh masyarakat setempat.” (Wawancara tanggal 4 Februari 2009).

Hal senada juga diutarakan oleh Ibu Dra. Hermiawati, selaku Kepala Bagian Sosial BPS Kota Surakarta yang mengatakan :

” Untuk meminimalkan ketidak puasan itu sebelum pendataan dilakukan sosialisasi ke kelurahan dan kecamatan. Apakah terjadi konflik atau tidak kita belum tahu, kan hasilnya belum keluar.”

(Wawancara tanggal 16 Februari 2009).

Ibu Bety Susbiyanti, selaku staf Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta juga menambahkan :

” Sosialisasi BLT itu dilakukan sebelum pelaksanaannya mbak. Dan sosialisasinya itu berjenjang hingga sampai kepada aparat desa untuk kemudian disampaikan kepada warga miskin.” (Wawancara 29 April 2009).

Sosialisasi yang berjenjang tersebut sampai di masyarakat biasanya melalui suatu Forum Desa seperti PKK ataupun pertemuan rutin kampung, sosialisasi tersebut diberikan oleh Ketua RT atau pengurus setempat. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Ibu Mulyani yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, beliau mengatakan sebagai berikut :

"Ada sosialisasinya kok mbak, kalau ditempat saya sosialisasinya waktu pertemuan PKK dan pertemuan rutin kampung. Itu yang kasih tahu pak RT. " (Wawancara tanggal 27 April 2009).

Ibu Siti Sundari, warga Laweyan menambahkan :

"Sosialisasinya dulu itu melalui pertemuan rutin RT mbak, yang memberitahu pak RT sama pengurus RT mbak kalau ada bantuan dari pemerintah. " (Wawancara tanggal 27 April 2009).

Penerima dana BLT harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi salah sasaran yang menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Dengan mengacu pada 14 variabel yang menjadi tolok ukur penerima BLT, pemerintah menentukan masyarakat miskin yang berhak menerima BLT. Kriteria ini dijadikan acuan bagi BPS untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang menerima BLT. Jika seseorang tersebut sudah memenuhi 9 dari 14 kriteria yang disyaratkan, maka orang tersebut layak menerima dana BLT. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Hermiawati, selaku Kepala Bagian Sosial BPS Kota Surakarta yang mengatakan :

"Soal yang berhak atau tidak itu, anu ya mbak ya, yang jelas pada saat kita menentukan seseorang itu layak diusulkan calon penerima atau tidak itu kita berpedoman pada kriteria. Kita kan ada 14 kriteria, kalau dari 14 kriteria yang disyaratkan, 9 saja sudah dipenuhi berarti rumah tangga itu layak diusulkan, patokannya hanya itu saja. Jadi seseorang bisa sebagai calon atau tidak itu dari kriteria, bukan dari subyektifitas."

(Wawancara tanggal 16 Februari 2009).

Hal senada ditambahkan oleh Bapak Sutono, salah satu staf BPS Kota Surakarta yang mengatakan :

“Kita kalau petugas itu ndak menentukan kriterianya mbak, itu kan dari pusat. Jadi 14 kriteria itu kita tanyakan, kemudian kita mendatangi rumah warga yang diusulkan untuk liat kondisi rumahnya, tapi sebelumnya kita ke RT dulu. Minta data warga miskin yang diajukan menerima BLT, kan kadang ada RT yang subyektif mbak, jadi untuk kebenarannya ya mendatangi rumahnya.” (Wawancara tanggal 23 April 2009).

Berkaitan dengan Program BLT di Kota Surakarta, perlu ditetapkan jumlah Rumah Tangga Miskin di Kota Surakarta yang layak menerima Program BLT atau tidak. Data tersebut berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh petugas BPS. Karena, data dari BPS merupakan data yang resmi dari pemerintah. Pendataan tersebut tidak asal-asalan, tetapi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Hermiawati, selaku Kepala Bagian Sosial BPS Kota Surakarta yang mengatakan :

“...Proses awal pendataan, BPS melakukan pendataan, BPS kan tersebar disetiap kabupaten kota. Setelah hasil pendataan selesai dikembalikan ke propinsi, kemudian ke pusat, sampai di BPS pusat diolah tidak semata-mata hasil lapangan kemudian selesai, ini lho hasilnya, tidak begitu. Kemudian ada uji statistik segala macam. Kalo dah selesai hasilnya dikembalikan ke tingkat dua kemudian diserahkan ke pemerintah kota baru dipakai ”

(Wawancara tanggal 16 Februari 2009).

Bapak Sutono, salah satu staf BPS Kota Surakarta menambahkan :

“ Pendataannya ? Kita mendata warga miskin yang masuk kriteria, kalau sudah hasilnya dikirim ke Propinsi kemudian ke Pusat sana mbak. Datanya diolah baru dikembalikan ke Propinsi baru kemudian kembali ke kita lagi. Datanya tidak sembarangan kan mbak ? ”(Wawancara tanggal 23 April 2009).

Dalam pendataan RTS yang berhak menerima BLT di Kota Surakarta, BPS menggunakan strategi pencacahan di lapangan sebagai berikut:

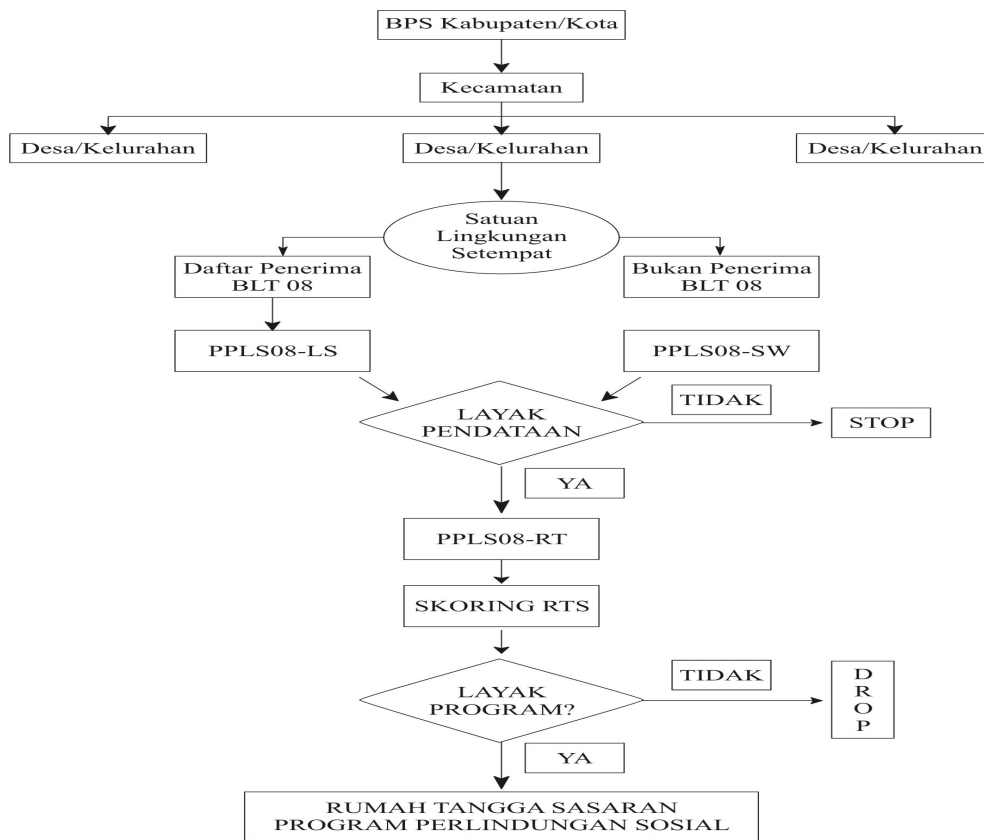
- c. Tim akan menerima daftar PPLS08-LS (daftar yang didalamnya sudah berisikan nama-nama penerima BLT 2008 dalam datu RT) sesuai dengan wilayah tugas yang ditetapkan.
- d. Tim membagi wilayah kerja dengan anggota timnya.
- e. Petugas menghubungi kepala kelurahan untuk memberitahukan bahwa proses pendataan akan dilakukan di desa/kelurahan yang bersangkutan.
- f. Petugas melakukan verifikasi awal daftar PPLS08-LS.
- g. Petugas melakukan verifikasi terhadap daftar PPLS08-SW (daftar yang akan digunakan oleh tim untuk menuliskan nama-nama rumah tangga yang diduga tidak mampu tetapi terlewat pada saat pelaksanaan PSE05 dan belum terdaftar pada saat pemberian BLT).
- h. Untuk setiap rumah tangga yang selesai diwawancarai dengan daftar PPLS08-RT (daftar yang berisikan berbagai macam pertanyaan mengenai kondisi sosial ekonomi rumah tangga). Petugas harus meminta tanda tangan pernyataan.
- i. Sebelum seluruh daftar diserahkan ke pengawas/pemeriksa Petugas harus menyampaikan hasil pendataan kepada KetuaRT/Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan untuk mendapatkan masukan.
- j. Petugas menyerahkan hasil pencacahan ke Pengawas.
- k. Hasil pendataan tersebut kemudian akan dientry di BPS Kabupaten/Kota dan penentuan kelayakannya akan ditentukan dengan menggunakan metode *Scoring*.

Untuk memperjelas strategi pencacahan yang dilaksanakan oleh BPS dalam pelaksanaan Program BLT 2008, berikut ini digambarkan bagan/alur strategi pencacahannya:

Gambar 3.2

Strategi Pencacahan RTS dalam Program BLT 2008

Sumber : Sosialisasi Program Perlindungan Sosial (PPLS08) Tahun 2008



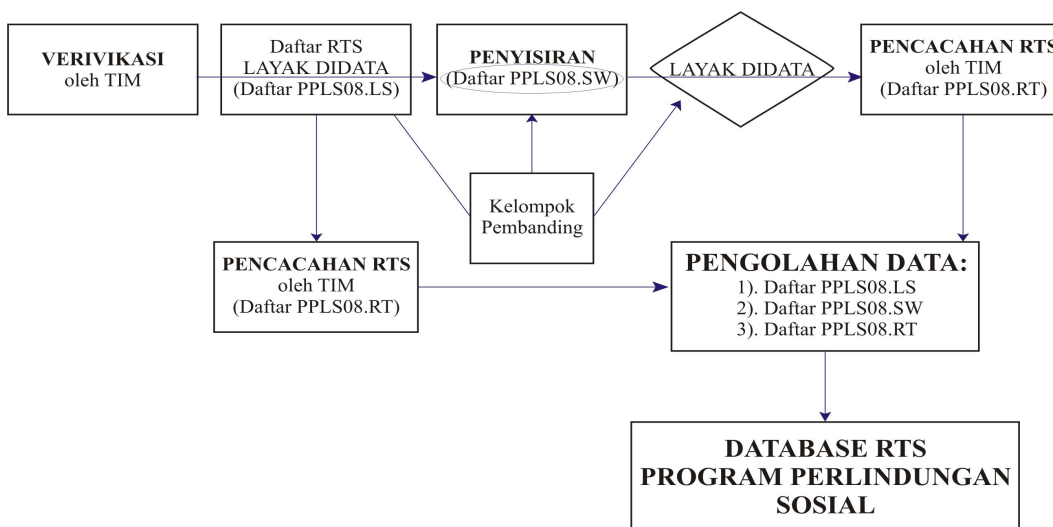
Dan untuk mekanisme pencacahan PPLS08, verifikasi dilakukan oleh tim yang mendata warga yang layak

menerima Program Perlindungan Sosial. Tim yang dibentuk terdiri dari karyawan BPS dan petugas perwakilan dari kelurahan, dimana setiap tim bertanggung jawab untuk melaksanakan *up date* sekaligus verifikasi di setiap RT didalam wilayah yang menjadi tugasnya. Hal ini karena PPLS08 tidak hanya digunakan untuk Program BLT saja, tetapi juga Program Perlindungan Sosial lainnya, seperti Jamkesmas, BOS, Raskin dan sebagainya. Setelah didata, daftar RTS

tersebut langsung dilakukan pencacahan atau melalui proses penyisiran dahulu untuk mendapat RTS yang benar-benar layak masuk daftar RTS Program Perlindungan Sosial. Setelah data diperoleh kemudian data tersebut diolah untuk kemudian dijadikan database RTS yang masuk Program Perlindungan Sosial. Untuk lebih jelasnya, berikut ini digambarkan mekanisme pencacahan PPLS08 sebagai berikut :

Gambar 3.3

Mekanisme Pencacahan PPLS08



Sumber : Sosialisasi Program Perlindungan Sosial (PPLS08) Tahun 2008

Program BLT merupakan program yang istimewa dan diprioritaskan kepada masyarakat miskin agar mampu beradaptasi dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Pada saat pendataan, tidak begitu banyak kendala yang dialami BPS selaku instansi yang berwenang menyediakan data jumlah warga miskin yang layak menerima BLT. Hanya saja, pada saat data tersebut sudah keluar, ada beberapa warga yang protes karena tidak mendapatkan dana BLT. Hal ini mungkin dikarenakan orang tersebut sudah terbiasa mendapat bantuan dana pada BLT yang pertama, kemudian pada saat Program BLT tahap berikutnya tidak mendapatkan. Sehingga muncul ketidakterimaan terhadap hasil pendataan. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Dra. Hermiawati, selaku Kepala Bagian Sosial BPS Kota Surakarta yang mengatakan :

“...Tidak ada hambatan pada saat pendataan, pada umumnya saat mendata biasanya

itu lancar, hanya nanti pada saat hasil data itu dirilis yang biasanya tidak lancar, kan ada orang yang bisa menerima dan tidak, karena yang namanya sudah biasanya menerima uang kemudian tidak diusulkan itu kan biasanya tidak bisa menerima lagi, nah itu kan nanti ada yang puas ada yang tidak.” (Wawancara tanggal 16 Februari 2009).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Sutono, salah satu staf BPS Kota Surakarta yang mengatakan bahwa :

“...Ya., hambatannya itu terkadang ada RT yang ndak mau dimintai data itu mbak, kan kadang ada yang takut kalau diprotes warganya karena ada yang ndak dapat BLT. Tapi ya itu cuma sebagian kecil saja kok. Jadi ya kita ngatasinnya dengan cari sumber yang lain yang mau mbak, kayak perangkat desa setempat atau kalau tidak ya kita survey kerumahnya satu per satu untuk kebenaran pencarian data. Untuk selebihnya ndak ada masalah mbak. ” (Wawancara tanggal 23 April 2009).

7) **Permasalahan Dalam Penyaluran BLT kepada RTS**

Kurang meratanya pemberian dana BLT kepada masyarakat miskin terkadang menimbulkan rasa tidak terima atau iri bagi warga yang tidak mendapatkan dana BLT. Tak heran jika terkadang muncul kecemburuan sosial di kalangan masyarakat miskin. Warga yang merasa tidak terima dengan data tersebut terkadang melancarkan aksi protes dan menganggap program tersebut tidak tepat sasaran. Namun tak jarang ada warga yang bisa menerima hasil data yang dirilis oleh BPS Kota Surakarta. Mereka menyadari bahwa ada warga yang lebih berhak dari mereka untuk menerima dana BLT. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Maryanto, yang berprofesi sebagai tukang las didaerah Kratonan, mengatakan :

“Ya itu tergantung, bagi saya sudah tepat kalau itu diperuntukkan memang bagi orang yang kurang mampu. Tapi kadang ada yang ngiri trus protes gitu, jadi ya tidak pas kalau gitu.”

(Wawancara tanggal 11 Februari 2009).

Pernyataan diatas juga dipertegas oleh seorang warga yang bernama Ibu Suprihatin, 49

Tahun. Beliau mendapat dana BLT pada tahun 2005, sedangkan pada tahun 2008 tidak mendapatkan dan BLT karena dirasa aparat setempat derajat kehidupannya lebih baik. Seperti yang dikutip dari wawancara berikut :

“Katanya yang sudah tanda tangan itu nantinya dapat lagi mbak, tapi kok kemarin itu saya ndak dapat. Masalahnya ndak disuruh tanda tangan. Itu ada sebabnya mbak, kata pak RW saya sudah tidak dapat lagi karena saya sudah bisa bekerja sendiri dan sudah lancar .” (Wawancara tanggal 18 Februari 2009).

Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Slamet Suryadi, warga Laweyan yang merasa pembagian dana BLT belum begitu tepat sasaran, beliau mengatakan :

“Saya rasa belum pas ya mbak, karena masih ada tetangga saya yang miskin tetapi dia tidak mendapat BLT. Sedangkan di RT lain yang secara ekonomi lebih mampu malah mendapat BLT.” (Wawancara tanggal 27 April 2009).

Ibu Kirni juga menambahkan hal serupa sebagai berikut :

“ Kalau menurut saya tepat, tapi kan yang lainnya juga ada yang salah sasaran to mbak. Lha masak penghasilannya saja lebih dari cukup tapi dapat BLT, kan itu ndak pas to.” Wawancara tanggal 18 Februari 2009).

Program BLT bagi RTS rawan dengan penyelewengan, di Kota Surakarta kasus penyelewengan yang sering ditemukan adalah pemotongan dana dan salah sasaran. Sejak BLT dikururkan bagi RTS, terdapat orang-orang yang tak merasa malu mengaku miskin hanya karena menginginkan BLT itu. Alasan pemotongan dana pun bermacam-macam, diantaranya untuk biaya administrasi, fasilitas umum, dibagikan secara merata, uang keamanan dan lain-lain. Tak jarang pemotongan dana BLT pada tahun 2005 dan tahun 2008 pada tahap pertama juga tidak terealisasi sehingga warga merasa dana tersebut diselewengkan, seperti yang diungkapkan salah seorang warga Pringgolayan, Bapak Suyanto sebagai berikut :

“Setahu saya itu tidak ada aturan pemotongan dana untuk kepentingan bersama, kalau ada itu mesti sudah ada aturan dari pusat. Tetapi disini ada dengan alasan untuk kepentingan bersama, itu tidak obyektif. Pemotongannya variatif, ada yang Rp 25.000 sampai Rp 175.000. Pemotongan itu, misalnya untuk pemasangan listrik, warga dan janda yang tidak dapat, ternyata tidak terealisasi.” (Wawancara tanggal 18 Februari 2009).

Hal senada diutarakan oleh Ibu Gunawan yang berprofesi sebagai wiraswasta, beliau mengatakan sebagai berikut :

“Ada pemotongan mbak dari RT, besarnya itu RP 25.000. dulu katanya untuk kepentingan warga, itu lho mbak untuk buat kursi dan perkakas buat warga.” (Wawancara tanggal 18 Februari 2009).

Ibu Suprihatin, warga Pringgolayan juga menambahkan hal yang serupa, beliau mengatakan :

“ Yang dapat BLT tahun 2005 itu, pertama ada pemotongan dana Rp 75.000 tiap orang, yang kedua Rp 50.000. Itu katanya untuk ngasih yang ndak dapat mbak, yang motong ya dari RTnya mbak.” (Wawancara tanggal 18 Februari 2009).

Untuk mencegah semakin maraknya kasus pemotongan BLT oleh aparat setempat, maka pemotongan dana BLT dengan alasan apapun tidak diperbolehkan lagi. Hal ini bertujuan agar RTS penerima BLT menerima dana tersebut secara utuh. Dan untuk mencegah terjadinya pemotongan dana BLT 2008 pada tahap kedua, penerima BLT harus mengambilnya sendiri dan tidak boleh diwakilkan, serta membawa KTP. Selama pelaksanaan pembayaran dana BLT 2008 tahap kedua, DKRPP&KB Kota Surakarta berupaya sebaik mungkin untuk memonitoring pelaksanaannya di tingkat wilayah. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Ibu Sri Iriana, SH selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mengatakan sebagai berikut :

“Sekarang pemotongan itu ndak boleh lagi mbak, makanya pada pengambilan BLT 2008 tahap kedua yaitu bulan September, yang mengambil harus orangnya sendiri ke kantor pos atau kelurahan dengan bawa KTP sendiri dan ndak boleh diwakilkan. Trus

kalau misalnya dia memang warga sini tapi tidak mempunyai KTP. Ya dia ndak bisa ambil mbak.” (Wawancara 29 April 2009).

Ibu Bety Susbiyanti, selaku staf Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat
DKRPP&KB Kota Surakarta menambahkan :

” Untuk di Solo sendiri mulai BLT tahap dua kemarin sudah ndak ada pemotongan BLT lagi mbak, jadi dana BLT itu benar-benar utuh diterima oleh warga yang berhak menerima BLT. Toh yang ngambil juga Warga penerima BLT sendiri dan tidak boleh diwakilkan mbak.”(Wawancara 29 April 2009)

E. Strategi DKRPP&KB dalam Mencegah Terjadinya Penyimpangan Dana BLT 2008 Di Kota Surakarta

Dengan mencuatnya problematika tersebut, maka dalam pelaksanaan Program BLT, DKRPP&KB Kota Surakarta selaku instansi yang mendapat tugas dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program di tingkat kota harus mempunyai strategi untuk mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan dana BLT 2008. Strategi yang digunakan adalah optimalisasi monitoring pelaksanaan Program BLT agar setiap permasalahan yang muncul segera teratasi. Kemudian mengevaluasi pelaksanaannya dan melaporkannya kepada pemerintah pusat agar tidak terjadi permasalahan yang sama pada pelaksanaan Program BLT tahap berikutnya. Strategi ini bertujuan agar pelaksanaan Program BLT lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga Program BLT dirasakan lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin. Dan strategi yang digunakan tersebut hendaknya merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan Program BLT 2005 yang dirasakan kurang matang pelaksanaannya.

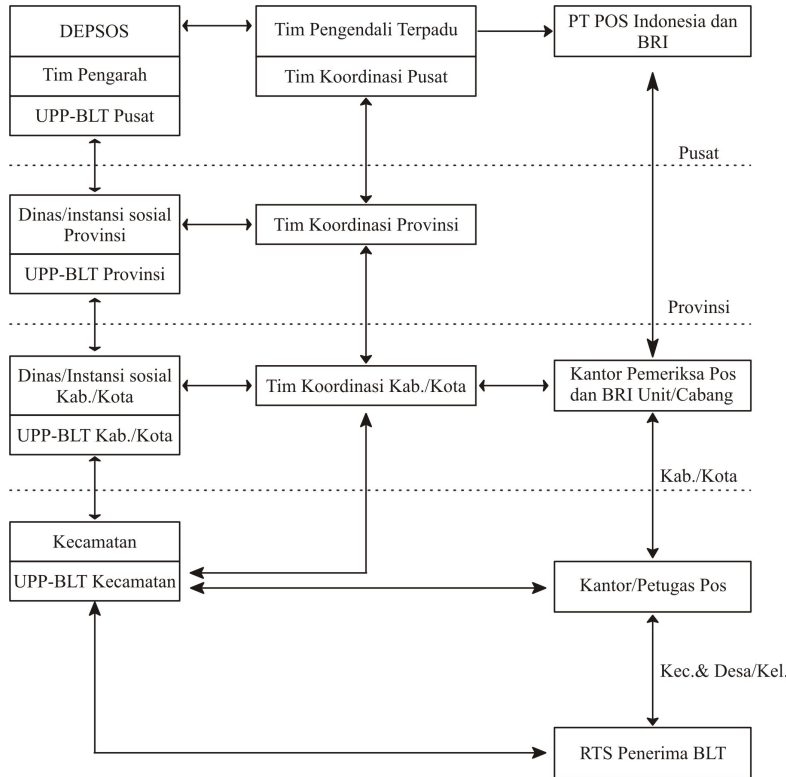
Lebih lanjut, indikator yang gunakan DKRPP&KB Kota Surakarta dalam mencegah penyimpangan dana BLT 2008 di Kota Surakarta, antara lain: (1) Pelaksana strategi dalam mencegah penyimpangan dana BLT 2008 di Kota Surakarta, (2) Bentuk strategi yang digunakan,

(3) Implementasi Strategi DKRPP&KB dalam mencegah penyimpangan dana BLT 2008 di Kota Surakarta. Indikator yang menjadi acuan DKRPP&KB dalam menanggulangi penyimpangan dana BLT 2008 di Kota Surakarta tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pelaksana Strategi dalam Mencegah Penyimpangan Dana BLT 2008 di Kota Surakarta

Penyaluran BLT kepada RTS merupakan suatu bentuk kerjasama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing, sehingga masing-masing lembaga bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas dibidang masing-masing. Bentuk kerjasama ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyaluran dana BLT-RTS kepada kelompok sasaran sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal. Untuk dapat mengetahui dengan lebih jelas mengenai struktur organisasi program BLT, berikut ini digambarkan struktur organisasi pelaksanaan Program BLT dari tingkat Pusat hingga sampai ke Rumah Tangga Sasaran penerima BLT.

Gambar 3.4
Struktur Organisasi
Program Bantuan Langsung Tunai



Sumber : Petunjuk Teknis
Penyaluran BLT kepada RTS

Dari bagan diatas Tim Pengendali Program BLT menugaskan pejabat yang terkait untuk terlibat dalam Tim Koordinasi Program BLT-RTS untuk terus menerus melakukan

koordinasi secara intensif dalam pelaksanaan Program BLT-RTS sesuai dengan kewenangannya di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Disini DKRPP&KB Kota Surakarta sebagai instansi yang melaksanakan program BLT, bertugas mengelola UPP-BLT di tingkat kota serta bekerja sama dengan Tim Koordinasi Tingkat Kota untuk mensosialisasikan Pelaksanaan Program BLT ke tingkat Kecamatan. Dari Kelembagaan Tim Koordinasi Program BLT-RTS pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan optimalisasi fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Program BLT kepada RTS bagi Rumah Tangga Sasaran adalah :

- Merencanakan langkah-langkah strategis dan operasional pendistribusian KKB dan penyaluran dana BLT-RTS kepada Rumah Tangga Sasaran.
- Mengidentifikasi dan melakukan kerjasama dengan mitra kerja untuk sosialisasi program BLT-RTS.

- Mengkoordinasikan jajaran/perangkat atau jaringan/mitra kerja pada tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan kecamatan dan desa/kelurahan pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pengendalian Program BLT-RTS.
- Melakukan pembahasan dan membantu penyelesaian masalah (antara lain pada saat penetapan Rumah Tangga Sasaran, distribusi KKB, penyaluran dana BLT-RTS, dll.) sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait.
- Menggalang tanggung jawab sosial dan partisipasi masyarakat (Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat) dalam menyukseskan pelaksanaan Program BLT-RTS.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program BLT-RTS secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing anggota tim koordinasi.

Dan untuk Kota Surakarta, pelaksanaan program BLT dilaksanakan oleh DKRPP&KB Kota Surakarta selaku instansi yang mempunyai kompetensi dalam kesejahteraan masyarakat yang dibantu oleh pihak-pihak terkait. Pernyataan tersebut seperti yang diutarakan oleh Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta, Ibu Dra. Titik Budi Rahayu, Msi yang mengatakan sebagai berikut :

"terkait dengan tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta salah satunya itu termasuk urusannya TKPKD, terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi. Tim ini bertugas memayungi semua program-program kemiskinan yang ada di kota Surakarta. Baik itu yang berasal dari Pusat ataupun propinsi ataupun Kota, seperti BLT, Raskin, BOS, Jamkesmas itu nanti semuanya harus ditangani oleh TKPKD yang anggotanya terdiri dari beberapa SKPD atau Dinas Bagian yang menangani kemiskinan, seperti Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, UKM. Semua menangani program kemiskinan, cuma dalam bentuk beda. Misalnya seperti kita dulu ada sosial penanganan kemiskinannya dengan rumah tidak layak huni, membangun rumah-rumah yang tidak layak huni, rumah tidak layak huni itu ada kriterianya. Sehingga penanganan kemiskinan terpadu melalui TKPKD, jadi keterkaitan dengan ini memang sangat terkait mbak, karena memang punya kepentingan yang sama." (Wawancara tanggal 4 Februari 2009).

Ibu Bety Susbiyanti selaku Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta, menambahkan :

” Program BLT ini merupakan kerjasama dari banyak pihak mbak, untuk di Solo sendiri kita bekerja sama dengan Kantor Pos dan BPS misalnya. Jadi diperlukan koordinasi yang baik dari pihak-pihak terkait agar program ini berjalan dengan baik.” (Wawancara 29 April 2009).

Ibu Sri Iriana, SH selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat juga menambahkan :

“Program BLT kan termasuk program besar mbak apalagi dari pemerintah pusat, jadi banyak pihak yang terkait dalam program BLT ini. TKPKD Surakarta juga masuk didalamnya mbak, kan ini juga termasuk menangani kemiskinan.” (Wawancara 29 April 2009).

2. Bentuk Strategi yang digunakan

Strategi yang digunakan DKRPP&KB Kota Surakarta dalam menanggulangi penyimpangan dana BLT berupa strategi yang bersifat preventif, yaitu dengan memperbaiki kekeliruan pada pelaksanaan Program BLT pada tahun 2005 yang dinilai tidak tepat sasaran agar tidak terulang lagi pada Program BLT 2008. Selain itu, DKRPP&KB Kota Surakarta mengikuti petunjuk dari pusat mengenai strategi yang digunakan.

Dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program BLT kepada RTS, DKRPP&KB Kota Surakarta juga membentuk Unit Pelaksana Program BLT (UPP-BLT) tingkat kota dan kecamatan. UPP-BLT biasanya dibentuk dari tingkat pusat sampai dengan kecamatan, UPP-BLT tersebut mempunyai tugas melakukan monitoring, meminta data realisasi BLT, melakukan rapat koordinasi dengan petugas setempat dan monitoring penyaluran dan BLT kepada RTS. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Dra. Titik Budi Rahayu, Msi selaku Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta, yang mengatakan sebagai berikut :

"...dibentuk Unit Pelaksana Program BLT tingkat kota dan tingkat kecamatan, yang tingkat kota tugasnya melakukan monitoring, meminta data realisasi BLT di tingkat kecamatan, melakukan rapat koordinasi bersama dengan camat, MUSPIKA, Koramil, Polsek dan melakukan monitoring ke lapangan ketika penyaluran BLT trus melaporkan hasilnya kepada menteri sosial lewat Dinas Sosial Propinsi Jateng. Tingkat kecamatan tugasnya melakukan rapat koordinasi dengan lurah, MUSPIKA, melakukan monitoring pelaksanaan BLT termasuk penggantian nama, misalnya yang sudah meninggal, monitoring distribusi BLT, kemudian melaporkan hasil kepada walikota." (Wawancara tanggal 4 Februari 2009).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Bety Susbiyanti, selaku staf Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta yang mengutarakan sebagai berikut :

"... UPP-BLT itu kan dibentuk sebagai tim pelaksana dari Program BLT, nah UPP-BLT itu terdiri dari semua instansi yang terkait dengan Program BLT ini mbak. Kayak Bappeda, BPS, Dinas Sosial gitu. Tujuannya ya agar koordinasi antara pihak-pihak yang terkait pada pelaksanaan BLT lebih baik mbak. Jadi kita bisa pantau kalau ada permasalahan dalam pelaksanaan BLT." (Wawancara tanggal 29 April 2009).

Ibu Sri Iriana, SH selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat juga menambahkan :

"....UPP-BLT Surakarta sendiri terdiri beberapa instansi mbak, seperti DKRPP sendiri, BPS, Bappeda, Camat kayak gitu mbak, kan itu semacam tim. UPP-BLT ini sebelum pelaksanaan BLT kan mengadakan rakor mbak, yang tujuannya itu untuk menjamin optimalisasi pelaksanaan BLT mbak. Tugasnya juga monitoring pelaksanaan BLT mbak." (Wawancara tanggal 29 April 2009)

Rapat koordinasi yang dilakukan oleh UPP-BLT bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antara pihak-pihak yang terlibat dalam Program BLT 2008, sehingga perkembangan pelaksanaan BLT dapat dipantau dan permasalahan yang terjadi dapat dicarikan jalan keluarnya. Peserta rapat Koordinasi biasanya terdiri dari :

30. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota

31. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota

32. Kepala BPS Kabupaten/Kota

33. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota

34. Seluruh Camat Kabupaten/Kota

35. Pihak-pihak terkait dalam Pelaksanaan Program BLT

UPP-BLT tersebut menerima laporan jika terjadi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan penyaluran Program BLT, yang kemudian akan dilaporkan ke DKRPP&KB Kota Surakarta. Bagi PT Pos yang bertugas menyalurkan dana BLT kepada RTS di Kota Surakarta, biasanya membuka layanan di kelurahan-kelurahan, kemudian membuat jadwal pengambilan. Hal ini dilakukan agar pengambilan dana BLT 2008 lebih mudah jika dibandingkan dengan pengambilan dana BLT tahun 2005 lalu. Dan jika ada RTS yang meninggal atau pindah, ada yang disetorkan kembali ke pusat kalau tidak digantikan orang yang tidak mendapatkan dana BLT. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta, Ibu Dra. Titik Budi Rahayu, Msi yang mengatakan sebagai berikut :

"Sebenarnya kalo UPP-BLTnya berjalan, istilahnya permasalahan apa yang timbul itu kan langsung diketahui, nah kemudian pelaksana penyalurannya sendiri itu kan langsung PT Pos Mbak, jadi anggarannya di PT Pos. PT Pos membuka layanan di kelurahan-kelurahan kemudian menjadwalkan pelaksanaan penyampaian bantuan itu. Nah kemudian bagi RTS yang sudah meninggal atau pindah itu kalau tidak diganti ya disetorkan kembali ke pusat, tapi sampai dengan hari ini belum ada konfirmasi berapa yang dikembalikan ke pusat, kita mau koordinasi dengan PT Pos." (Wawancara tanggal 4 Februari 2009).

UPP-BLT Kota Surakarta sendiri berjalan cukup bagus, karena setiap permasalahan yang muncul di lapangan segera ditangani. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Bety Susbiyanti, selaku staf Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta yang mengutarakan sebagai berikut :

"... UPP-BLT Solo berjalan dengan baik kok mbak, setiap ada permasalahan yang muncul dan dilaporkan kepada kita, segera kita direspon. Dan selama ini tidak ada

pelaporan dari masyarakat mengenai permasalahan dalam pelaksanaan BLT 2008 ini. Jadi untuk pelaksanaan BLT di Solo bisa dikatakan aman-aman saja.” (Wawancara tanggal 29 April 2009).

Ibu Sri Iriana, SH selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat menambahkan :

“ Kalau untuk UPP-BLT Surakarta saya rasa berjalan cukup baik ya mbak. Kita juga mengadakan rakor untuk membahas apa-apa saja yang musti kita lakukan pada pelaksanaan BLT, dan itu sesuai tugasnya masing-masing ya mbak. Contohnya pada saat tahap sosialisasi, disitu kita bahas bagaiman to tata cara persiapan penyerahan Kupon BLT.” (Wawancara tanggal 29 April 2009)

Pada saat rapat koordinasi, biasanya diberikan sosialisasi secara berjenjang mengenai persiapan tata penyerahan dan penerimaan Kupon BLT, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kepala KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) melakukan sosialisasi dengan walikota, Kepala Dinsos dan BPS untuk melakukan persiapan penyerahan Kupon BLT bertempat di Kantor Pemkot dengan peserta camat dan Lurah
- b. Pihak Pos menyerahkan daftar normatif RTS kepada lurah.
- c. Lurah melibatkan Ketua RT/RW dan diberikan waktu maksimal 2 (dua) hari untuk melakukan verifikasi daftar nominasi RTS sebelum dikembalikan kepada pihak pos.
- d. Penerima dalam daftar nominasi RTS yang dianggap tidak layak menerima BLT oleh ketua RT/RW dicoret dari daftar nominasi, dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan cap dinas ketua RT dan/atau Ketua RW dan/ atau Lurah.
- e. Ketua RT/RW menyerahkan daftar nominasi peserta RTS yang sudah diverifikasi kepada Lurah.
- f. Kepada Camat, Lurah, Ketua RT/RW atas aktivitas persiapan dan penyerahan Kupon BLT akan diberikan kompensasi yang besarnya akan ditetapkan kemudian oleh PT. Pos Indonesia (Persero). Kompensasi tersebut adalah sebagai apresiasi atas aktivitas penyerahan kupon BLT kepada RTS serta pengadministrasian naskah-naskah yang

bertalian.

Tatacara penyerahan kupon BLT dari Kepala Kantor Pos kepada Lurah, diantaranya sebagai berikut :

- b. Kupon BLT (masih dalam bentuk sampul dilak merah dan teraan Jakartatimur) diserahkan dari Kepala Kantor Pos kepada Lurah dilakukan di Balaikota.
- c. Pada saat membuka kiriman, lurah diminta untuk memeriksa keutuhan segel lak warna merah dengan teraan “Jakartatimur” yang disaksikan Kepala Kantor Pos (atau petugas yang ditunjuk)
- d. Sampul yang berisi fisik kupon BLT diperiksa, terutama kebenaran alamat kelurahan serta jumlah kupon BLT dengan memperhatikan nomor awal dan akhir.
- e. Serah terima dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Penyerahan rangkap tiga dengan peruntukan :
 - b. Lembar ke-1 disimpan di Kantor Pos sebagai arsip
 - c. Lembar ke-2 dikirimkan kepada Camat
 - d. Lembar ke-3 sebagai arsip Kelurahan.
- f. Lurah mencocokkan Kupon BLT dengan daftar Nominasi yang diverifikasi dipisahkan dari kupon BLT yang dinyatakan tidak layak. Kupon BLT yang dinyatakan tidak layak dicoret menyilang, dengan membubuhkan nama dan tanda tangan.

Tatacara penyerahan kupon BLT dari Lurah kepada Ketua RW, diantaranya sebagai berikut :

- E. Lurah berkoordinasi dengan ketua RW dalam rangka persiapan penyerahan Kupon BLT kepada RTS.

- F. Lurah menyortir Kupon BLT berdasarkan kelompok RW penerima Kupon BLT.
- G. Kupon BLT diserahkan oleh Lurah kepada Ketua RTW atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani serah terima Kupon BLT serta dilengkapi dengan plastik Kupon BLT.
- H. Penyerahan Kupon bLT dan Plastik Kupon BLT kepada RW dilakukan dengan menggunakan Berita Acara penyerahan Kupon BLT.
- I. Setelah diisi dan ditandatangani, formulir Berita Acara Penyerahan Kupon BLT disimpan di Kantor Kelurahan.

Tatacara penyerahan kupon BLT dari Ketua RW kepada Ketua RT, diantaranya sebagai berikut :

- a. Penyerahan kupon BLT dan plastic dari ketua RW kepada Ketua RT dengan menggunakan Berita acara Penyerahan Kupon BLT.
- b. Setelah diisi dan ditandatangani, formulis tersebut diimpan di kantor RW.

Tatacara penyerahan kupon BLT dari Ketua RT kepada RTS, diantaranya sebagai berikut :

- a. Ketua RT mengisi Berita Acara Penyerahan Kupon BLT
- b. Ketua RT menyerahkan kupon BLT beserta sampul plastic kupon BLT kepada RTS, diserahkan kepada Ketua RW. Untuk selanjutnya Berita Acara Penyerahan tersebut dikembalikan kepada Kepala Kantor Pos melalui Lurah.
- c. Lembar kedua Berita Acara Penyerahan tersebut disimpan oleh Ketua RT, yang pada saatnya akan dijadikan dasar penghitungan kompensasi.

Kemudian apabila dalam proses penerimaan di Kantor Kelurahan ditemukan ketidaksesuaian (*Irregularitas*), misalnya didapati selisih antara jumlah fisik Kupon BLT dengan data nomor awal dan akhir KIP, dalam keadaan rusak (sobek, basah, tidak terbaca dan sebagainya), maka Lurah atau pejabat yang ditunjuk segera melaporkan kepada Kepala Kantor Pos setempat untuk selanjutnya oleh Kantor Pos akan ditindaklanjuti seperlunya. Sedangkan

Kupon BLT yang tidak berhasil diserahkan oleh Ketua RT kepada RTS, dikembalikan kepada Kepala Kantor Pos setempat oleh Lurah setelah menerima dari RT dan RW dengan menggunakan Formulir Ketidaksesuaian.

Pada tahap pembayaran BLT, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh RTS yang menerima BLT. Hal ini agar proses pengambilan BLT berjalan dengan baik dan tidak seperti pada daerah lainya. Dan untuk Kota Surakarta, pengambilan BLT berjalan cukup lancar. Pernyataan ini diungkapkan oleh Ibu Sri Iriana, SH selaku Kepala sub Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mengatakan sebagai berikut :

“... kalau pada saat pengambilan BLT, Alhamdulillah mbak di Solo ndak da kekisruhan kayak daerah lainnya, semua berjalan dengan lancar. Itu juga ada lho mbak syarat-syarat buat yang menerima BLT waktu ngambil.” (Wawancara tanggal 29 April 2009).

Hal serupa juga diutarakan oleh Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta, Ibu Dra. Titik Budi Rahayu, Msi yang mengatakan sebagai berikut :

”Untuk di Wilayah Surakarta secara keseluruhan pengambilan BLT berjalan cukup lancar dan tertib mbak. Ndak ada yang rame-rame gitu.” (Wawancara 4 Februari 2009).

Ibu Bety Susbiyanti, selaku staf Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta menambahkan :

” Syarat-syarat ngambilnya ? Ada mbak, tujuannya kan supaya waktu pengambilannya itu berjalan lancar. Di Solo lancar mbak, tidak ada kisruh seperti di daerah lain mbak. Dan tidak ada desak-desakkan yang memakan korban pada saat pengambilan BLT. Kan sudah da jadwalnya dari Kantor Pos. Jadwal pengambilan sebelum jam 1 siang itu ngambilnya di kantor pos cabang, tapi kalau sudah lebih dari jam 1 ya ngambilnya di kantor pos pusat mbak.” (Wawancara 29 April 2009).

Dalam pembayaran BLT ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penerima BLT.

Adapun syarat-syarat pembayaran yang harus dipenuhi oleh RTS penerima BLT diantaranya :

- c. Penerima BLT harus antri dengan tertib dan membawa bukti diri (KTP/surat keterangan dari Lurah fotokopi KK) untuk dicocokkan dengan Kupon BLT.
- d. Untuk proses pengamanan agar dikoordinasikan dengan pihak keamanan atau Satpol PP.
- e. Dalam hal pembayaran BLT, menggunakan surat kuasa pada prinsipnya tidak diperbolehkan, pengunjuk diberitahu dan dicatat alamatnya untuk diantar ke rumah oleh petugas pos.
- f. Bagi penerima yang lumpuh, sakit keras, dan tidak memungkinkan untuk menuju tempat pembayaran, untuk proses pembayarannya dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.
- g. Penggunaan surat keterangan ahli waris, pada dasarnya sebelum kupon diserahkan kepada penerima, sudah dilakukan verifikasi oleh Lurah/Kades, RT, RW untuk dilakukan rembug desa.
- h. Apabila kupon oleh RT terlanjur sudah diantar ke alamat penerima, agar tidak memunculkan permasalahan baru, kupon dapat dibayarkan kepada ahli waris dengan menunjukkan surat keterangan keamtian dan surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh RT/RW/Lurah/Kades dan bukti diri pengunjuk yang serumah.
- i. Apabila penerima sedang diluar kota, kupon tidak dapat diuangkan oleh orang serumah, penguangan dapat dilakukan setelah penerima kembali dari luar kota.
- j. Kepada pengunjuk yang bukan penerima sebenarnya, akan diberi penjelasan seperlunya, bahwa kupon tidak harus diuangkan pada hari ini, melainkan masih bisa diuangkan sampai akhir Desember 2008 sambil menunggu penerima asli datang.
- k. Pembayaran secara kolektif tidak diperbolehkan.
- l. Ahli waris hanya diperbolehkan kepada suami/istri, kalau anak harus melalui daftar

berita acara.

DKRPP&KB Kota Surakarta selalu berupaya agar pelaksanaan Program BLT 2008 lebih tepat sasaran. Strategi yang digunakan DKRPP&KB Kota Surakarta untuk menanggulangi penyimpangan dana BLT 2008 berpedoman pada Inpres No 3 Tahun 2008, sehingga tidak menimbulkan resiko yang terlalu besar dan dapat dikontrol dalam pelaksanaannya. Dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program BLT, maka DKRPP&KB Kota Surakarta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Program BLT 2008. Monitoring pelaksanaan BLT bertujuan untuk memantau pelaksanaan penyaluran dana BLT kepada RTS pada sisi masukan (*inputs*) dan keluaran (*outputs*). Program monitoring ini akan mengidentifikasi berbagai hal yang muncul dalam pelaksanaan Program BLT sehingga memberi kesempatan kepada DKRPP&KB Kota Surakarta untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat manfaat (*outcomes*) dan dampak (*impacts*) pelaksanaan BLT-RTS.

Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ini dilakukan DKRPP&KB Kota Surakarta melalui pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan Program BLT. Hal tersebut diutarakan oleh Ibu Dra. Titik Budi Rahayu, Msi selaku Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta, yang mengatakan sebagai berikut :

” Monitoring dan evaluasi yang kita lakukan itu kayak pemantauan di lapangan, pembinaan dan penyelesaian masalah apabila terjadi pelaporan adanya masalah selama pelaksanaan BLT. Yang dimonitoring pada pelaksanaan BLT itu ya bagaimana penyalurannya dan jumlah RTS yang menerima BLT.kemudian kita evaluasi hasilnya mbak.” (Wawancara 4 Februari 2009).

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Bety Susbiyanti, selaku staf Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta menambahkan :

” Monitoring yang kita lakukan itu biasanya berupa pemantauan pada waktu pelaksanaan BLT mbak. Dengan monitoring kan kita bisa tau proses penyalurannya dan jumlah RTS yang menerima BLT mbak. Nah kalau udah dimonitoring kemudian kita evaluasi. ” (Wawancara 29 April 2009)

Ibu Sri Iriana, SH selaku Kepala sub Bagian Kesejahteraan Rakyat menambahkan sebagai berikut :

“ Yang dipantau itu bagaimana pelaksanaannya, kita muter ke lokasi-lokasi pembagian gitu, tapi sayangnya pas pembagian kemarin itu kita datangnya kesiangin, jadi ndak tau persis. Pembagian BLT di lokasi itu juga kita dokumentasikan lho mbak, jadi kita ambil foto-fotonya.” (Wawancara 29 April 2009)

DKRPP&KB Kota Surakarta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan tujuan agar dapat dipastikan pelaksanaan Program BLT diterima dalam jumlah dan sasaran yang tepat. Adapun komponen yang dimonitor dan dievaluasi antara lain adalah:

- a. Alokasi dana Program BLT -RTS.
 - b. Penyaluran dan penyerapan dana.
 - c. Manfaat dan dampak dari BLT-RTS
 - d. Pelayanan dan penanganan pengaduan.
 - e. Administrasi keuangan.
 - f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- b. Pelaporan

Setelah melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan Program BLT 2008, maka DKRPP&KB Kota Surakarta wajib membuat laporan hasil kegiatan. Laporan tersebut biasanya berupa realisasi penyaluran dan penyerapan dana, hasil penanganan pengaduan

masyarakat, manfaat dan dampak dari Program BLT untuk Rumah Tangga Sasaran.

Ibu Dra. Titik Budi Rahayu, Msi selaku Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta mengutarakan sebagai berikut :

"...kan ada laporan ke pusat mbak. Jadi sesudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan, kita ada pelaporan ke pusat. Yang dilaporkan itu kalau ada pengaduan dari masyarakat misalnya, gimana realisasinya di lapangan mbak, kayak berapa jumlah RTS yang menerima BLT kemudian berapa jumlah Kupon BLT yang dikembalikan. Nah laporannya itu berjenjang juga mbak." (Wawancara 4 Februari 2009).

Ibu Bety Susbiyanti, selaku staf Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta menambahkan :

" Iya, kita ada laporan mbak tiap bulannya, laporannya juga dibuat bukannya kalau habis BLT dibagikan saja. Tapi kita buat laporan tiap akhir bulan mbak. Laporan yang kita buat itu isinya sama dengan yang dibuat sama Kantor Pos. Kalau ada yang beda kita periksa kembali mbak, mana yang keliru. Nah setelah sama, baru laporan itu dikirimkan ke Propinsi. "(Wawancara 29 April 2009).

Ibu Sri Iriana, SH selaku Kepala sub Bagian Kesejahteraan Rakyat juga menambahkan sebagai berikut :

" Yang dilaporkan ke Propinsi itu bagaimana pelaksanaan BLT, ada masalah ndak selama penyalurannya, kemudian jumlah warga yang menerima dan Kupon yang dikembalikan, semacam itu. Foto yang kita ambil waktu pembagian itu juga ikut kita kirimkan mbak, kayak sebagai bukti gitu." (Wawancara 29 April 2009).

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh DKRPP&KB Kota Surakarta cukup optimal. Hal ini dapat dilihat bagaimana keseriusan DKRPP&KB Kota Surakarta dalam memantau jalannya pelaksanaan Program BLT. Kemudian melaporkan hasilnya kepada Propinsi, dan hal ini sesuai dengan tugas

DKRPP&KB Kota Surakarta yang terdapat dalam Inpres No 3 Tahun 2008 mengenai Petunjuk Teknis Penyaluran BLT kepada RTS.

3. Implementasi Strategi DKRPP&KB dalam Mencegah Penyimpangan Dana BLT 2008 di Kota Surakarta

Strategi yang digunakan DKRPP&KB untuk mencegah penyimpangan dana BLT 2008 di kota Surakarta telah sesuai dengan petunjuk dari pusat. Jadi, dalam mengimplementasikannya juga tidak terdapat hambatan. Dan apabila dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan, maka akan dilaporkan Dinas Sosial tingkat Propinsi terlebih dahulu untuk kemudian dilaporkan ke Pusat (Depsos). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi pada pelaksanaan Program BLT di tahun mendatang. Pernyataan tersebut seperti yang diutarakan oleh Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta, Ibu Dra. Titik Budi Rahayu, Msi yang mengatakan sebagai berikut :

“Tidak ada hambatan dari strategi yang digunakan. Apabila terjadi kegagalan, nanti kita wujudnya hanya mengirimkan laporan-laporan seandainya terjadi kendala. Lapornya nanti secara berjenjang tingkat propinsi, nanti propinsi melaporkan ke pusat. Agar tidak terjadi di tahun mendatang.” (Wawancara 4 Februari 2009).

Ibu Sri Iriana, SH selaku Kepala sub Bagian Kesejahteraan Rakyat menambahkan sebagai berikut :

“ Selama pelaksanaannya ndak ada hambatan kok mbak, kalau misalnya gagal ya kita buat laporan supaya tidak terulang lagi.” (Wawancara 29 April 2009).

Penyaluran dana BLT 2008 kepada masyarakat miskin menggunakan prosedur yang lebih baik daripada penyaluran BLT 2005. Dan apabila dalam penyaluran terdapat warga yang protes karena tidak menerima BLT, maka DKRPP&KB Kota Surakarta meminta agar pada saat

penyaluran BLT ada petugas dari BPS yang mendampingi, seperti yang dikehendaki oleh Walikota Surakarta. Hal tersebut diutarakan oleh Ibu Dra. Titik Budi Rahayu, Msi selaku Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta, yang mengatakan sebagai berikut :

“Jadi kalo ada masyarakat yang komplain, itu dilihat saja dari BPSnya. Jadi pada saat pembagian BLT, pak Wali menghendaki adanya BPS ditempat pendistribusian BLT. Jadi nanti kalau ada yang komplain dibukakan datanya. Selama ini, pendataan BPS melibatkan personel di kelurahan, karena dulu banyak dikomplai. Nah mulai 2008, BPS mengadakan validasi data, jadi hasilnya lebih menasar.” (Wawancara 4 Februari 2009).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sri Iriana, SH selaku Kepala sub Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mengatakan sebagai berikut :

“Lha hal itu mestinya kita liat ke BPS yang punya datanya, jadi misalnya di kota A jumlah RTS nya segini, kota B jumlah RTSnya segini. Lha trus data itu dikirim kesini, baru kita bisa milah-milah mana yang harus dikasih. Kelemahan kita kurang SDMnya, personil kita juga terbatas, jadi terpaksa kita minta bantuan kepada pak lurah, pak RT dan RW. Nah pak lurah kan juga ndak mau kan kalau suruh turun tangan sendiri.” (Wawancara tanggal 29 April 2009).

Menanggapi mengenai adanya warga yang protes karena tidak mendapat dana BLT diutarakan oleh Ibu Drs. Hermiawati selaku Kepala Bagian Sosial BPS Kota Surakarta, yang mengatakan sebagai berikut :

“Kalau ada yang protes tidak dapat ya kita bukakan datanya, kan ada kuesionernya, kita simpan semua filenya. Kita kan datang satu-satu kerumah-rumah, jadi kalau ada yang tidak paham kuesioner itu kan syaratnya sudah bersifat nasional.” (Wawancara tanggal 16 Februari 2009).

Jadi masalah mengenai protes dari warga yang tidak mendapat dana BLT tidak sepenuhnya menjadi urusan DKRPP&KB Kota Surakarta, melainkan BPS. Karena tugas dari BPS

adalah penyedia data bagi DKRPP&KB Kota Surakarta untuk pelaksanaan Program BLT. Jadi, bila ada masyarakat miskin yang belum masuk database BPS untuk menerima BLT, padahal masuk kriteria miskin yang menyebabkan protes dari warga. Pernyataan tersebut diutarakan oleh Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta, Ibu Dra. Titik Budi Rahayu, Msi yang mengatakan sebagai berikut :

"...Yang jelas, data dari BPS dianggap belum mencakup semua maskin yang ada di Surakarta. Jadi gini, ada diantara mereka ada yang miskin, tapi di database BPS tidak muncul. Sehingga data penerima BLT yang didapat dari pendanaan BPS itu dianggap masih ada maskin yang belum tercover, akhirnya jadi rame kan mbak? Jadi kendalanya masalah pendataan, masih banyak warga miskin yang sebetulnya masuk kriteria miskin tetapi tidak terdata." (Wawancara 4 Februari 2009).

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa strategi yang digunakan DKRPP&KB dalam mencegah penyimpangan dana BLT 2008 di Kota Surakarta diantaranya :

- c. Sosialisasi mengenai Program BLT secara berjenjang ke tingkat bawah sebelum pelaksanaan Program BLT.
- d. Optimalisasi monitoring untuk mengetahui sedini mungkin permasalahan yang mencuat pada saat pelaksanaan Program BLT. Dengan monitoring kesalahan sekecilpun dapat ditemukan sehingga dengan cepat akan dilakukan tindakan modifikasi mekanisme penyaluran dana BLT kepada RTS.
- e. Untuk meminimalisir adanya pemotongan dana BLT oleh petugas setempat, maka DKRPP&KB Kota Surakarta melarang adanya pemotongan dana untuk alasan apapun. Strategi yang ditempuh adalah pengambilan dana BLT langsung oleh RTS tanpa perwakilan dengan membawa identitas diri, disini DKRPP&KB Kota Surakarta bekerja sama dengan

Kantor Pos.

- f. Untuk mengantisipasi adanya warga yang tidak terima karena tidak mendapat dana BLT, maka DKRPP&KB Kota Surakarta meminta petugas BPS untuk hadir pada saat pembayaran agar membukakan datanya, apakah yang bersangkutan masuk kriteria penerima BLT atau tidak.
- g. Strategi yang selanjutnya adalah DKRPP&KB Kota Surakarta mengevaluasi pelaksanaan Program BLT untuk mengukur tingkat efisiensi dan dampak Program BLT bagi RTS. DKRPP&KB Kota Surakarta juga menerima laporan dari masyarakat jika terdapat permasalahan selama pelaksanaan Program BLT untuk kemudian dibuat laporan berjenjang ke Pusat agar tidak terjadi permasalahan yang sama pada pelaksanaan yang akan datang.

Dalam mengimplementasikan strategi, DKRPP&KB Kota Surakarta juga menetapkan indikator keberhasilan strategi yang digunakan. Indikator tersebut diantaranya tidak adanya protes dari masyarakat mengenai Program BLT dan kartu BLT-RTS tepat sasaran. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta, Ibu Dra. Titik Budi Rahayu, Msi yang mengatakan sebagai berikut :

“ Indikator keberhasilan strategi ya tidak ada protes dari masyarakat, kartu BLT-RTS sampai ke sasaran kecuali yang dikembalikan karena meninggal atau pindah.”
(Wawancara 4 Februari 2009).

Indikator mengenai keberhasilan strategi juga diutarakan oleh Ibu Bety Susbiyanti, selaku staf Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta menambahkan :

” Yang jadi indikatornya itu ya tidak ada protes dari RTS warga, kemudian tepat sasaran dan waktu pembagian BLT berjalan lancar mbak. ” (Wawancara 29 April 2009).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sri Iriana, SH selaku Kepala sub Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mengatakan sebagai berikut :

“ Kalau masalah indikator ya yang penting BLT itu tepat sasaran mbak, kemudian ndak ada protes. Kalau misale ada yang protes, berarti strategi yang kita jalankan ndak berhasil to? Saya kira cuma itu ya mbak. ” (Wawancara 29 April 2009).

Strategi DKRPP&KB Kota Surakarta dalam mencegah penyimpangan dana BLT berupa monitoring dan evaluasi diimplementasikan selama Program BLT 2008 dilaksanakan. Monitoring Program BLT sendiri bertujuan agar pelaksanaan Program BLT sesuai dengan tujuan dan sasarannya, yaitu dan BLT tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan dana. Selain itu dengan monitoring Program BLT, kesalahan sekecilpun dapat ditemukan sehingga dengan cepat akan dilakukan tindakan modifikasi mekanisme Penyaluran dana BLT kepada RTS apabila hasil monitoring mengharuskan hal tersebut.

Sementara evaluasi pelaksanaan Program BLT bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi dan dampak Program BLT bagi RTS, dan untuk mengetahui apabila terdapat penyimpangan serta mengukur *outcome* Program BLT dan *input* bagi program lain yang akan datang. Evaluasi Program BLT menjadi salah satu strategi yang diimplementasikan DKRPP&KB Kota Surakarta dalam menanggulangi penyimpangan dana BLT di Kota Surakarta menjadi alasan tersendiri, diantaranya :

- b. Mengetahui tingkat efektivitas Program BLT 2008 dalam mencapai tujuannya, yaitu dana BLT tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan.
- c. Mengetahui apakah Program BLT berhasil atau gagal, dalam arti mampu mengurangi beban rumah tangga miskin selama kenaikan harga BBM yang disusul dengan haraga kebutuhan pokok lainnya.

- d. Memenuhi aspek akuntabilitas publik dengan melakukan penilaian kinerja Program BLT 2008.
- e. Memberi masukan agar tidak terjadi kesalahan yang sama dalam pelaksanaan Program BLT 2008, seperti Program BLT 2005 yang banyak tidak tepat sasaran dan terjadi penyimpangan dana.

Dengan monitoring dan evaluasi, dapat diketahui input dan output dari pelaksanaan Program BLT, hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Ibu Dra. Titik Budi Rahayu, Msi selaku Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta, yang mengatakan sebagai berikut :

“ Dari monitoring itu kita bisa tau mbak input dan outpunya. Misal berapa jumlah warga miskin yang ada di kota Surakarta, kemudian yang mendapat BLT berapa. Nah setelah program BLT ini berjalan bagaimana hasilnya, apakah berhasil atau tidak dalam membantu mengurangi beban hidupnya, efektif apa tidak gitu lho mbak. Karena sebetulnya kalau BLT thok nggak bisa, BLT itu hanya salah satu program pengurangan subsidi BBM yang tidak berhenti hanya sampai disitu. Namun ditunjang oleh program-program pengentasan kemiskinan kota lainnya. Soalnya selama ini kan pengentasan kemiskinan sudah banyak biayanya tapi tidak kelihatan saking banyaknya maskin. ” (Wawancara 4 Februari 2009).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sri Iriana, SH selaku Kepala sub Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mengatakan sebagai berikut :

“ Kelebihan dari monev (monitoring dan evaluasi) itu ya kita bisa tau Program BLT 2008 ini tepat sasaran apa tidak, kalau misalnya tidak, apa saja to yang menjadi penyebab ketidakberhasilannya itu. Jadi itu bisa buat masukan bagi Program-program lainnya yang akan datang mbak. Biar ndak ada permasalahan. Kan BLT 2008 ini juga bnelajar dari pengalaman BLT 2005 yang bisa dikatakan belum berhasil.” (Wawancara 29 April 2009).

Ibu Bety Susbiyanti, selaku staf Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Masyarakat DKRPP&KB Kota Surakarta menambahkan :

“ Iya mbak dari monitoring dan evaluasi itu bisa didapat input dan outputnya. Input dan outputnya itu kayak berapa jumlah maskin di Solo trus yang mendapat BLT jumlahnya berapa. Dari disitu kita juga bisa tau Program BLT ini bisa tepat sasaran

apa ndak. “ (Wawancara 29 April 2009).

Dari strategi yang diimplementasikan DKRPP&KB Kota Surakarta dalam menanggulangi penyimpangan dana BLT 2008 berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT. Menunjukkan bahwa DKRPP&KB Kota Surakarta berupaya untuk mengoptimalkan Program BLT 2008 bagi RTS agar lebih menyasar dibandingkan dengan Program BLT 2005. Implementasi strategi tersebut didukung dengan adanya pelaporan kepada instansi tingkat atasnya yang bersifat berjenjang untuk memberikan gambaran secara rinci dan lengkap mengenai pelaksanaan Program BLT 2008. Pelaporan tersebut mencakup kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan Program BLT 2008, kendala dan langkah-langkah mengatasi kendala yang telah dilaksanakan. Pelaporan berjenjang tersebut setelah sampai ke Dinas/Instansi Sosial Provinsi dilakukan penggabungan pada tingkat provinsi, selanjutnya laporan gabungan tersebut oleh Dinas/Instansi Sosial Provinsi disampaikan kepada Departemen Sosial kemudian kepada Kepala Biro Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Tujuan utama tercapai pelaksanaan Program BLT 2008 akan tercapai apabila strategi-strategi tersebut diimplementasikan dengan optimal oleh semua pihak yang terkait.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat dirangkum dalam bentuk tampilan matriks hasil penelitian, yaitu sebagai berikut :

GAMBAR 3.5
MATRIK HASIL PENELITIAN TENTANG STRATEGI DKRPP&KB KOTA SURAKARTA
DALAM MENANGGULANGI PENYIMPANGAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI 2008 DI KOTA SURAKARTA

TAHAP	PERMASALAHAN	INDIKATOR STRATEGI		
		PELAKSANA STRATEGI	BENTUK STRATEGI	PELAKSANAAN STRATEGI
O. Pendataan	8. Masih ada aparat desa yang enggan memberikan data jumlah warga yang berhak menerima BLT karena takut diprotes warganya.	BPS Kota Surakarta dibantu oleh perwakilan dari setiap kelurahan yang tergabung kedalam sebuah tim melakukan pendataan .	Melakukan pendekatan dengan aparat desa lainnya untuk meminta data. Strategi alternatifnya adalah mendata dengan mendatangi rumah warga satu per satu.	Petugas dari tim gabungan meminta data kepada petugas desa lainnya yang bersedia dimintai data jumlah warga yang berhak menerima dana BLT. Langkah lainnya adalah mendatangi rumah warga satu per satu untuk kebenaran pencarian data.
	9. Pada	BPS Kota Surakarta	Petugas melakukan	Untuk memperoleh data yang

	saat pendataan, terkadang ada aparat desa yang menentukan kriteria penerima dana BLT secara subyektif.	dibantu oleh perwakilan dari setiap kelurahan yang tergabung kedalam sebuah tim berupaya memperoleh data yang valid.	pengecekan kebenaran data yang diberikan.	valid jika seseorang benar-benar berhak menerima BLT dan masuk kedalam kriteria yang telah ditentukan maka petugas mendatangi rumah warga satu per satu untuk melakukan survey.
P. Penyaluran Dana BLT	b. Terdapat sejumlah warga tidak terima karena merasa berhak menerima dana BLT namun tidak menerima dana BLT.	DKRPP&KB Kota Surakarta berperan mensosialisasikan Program BLT.	DKRPP&KB Kota Surakarta memberikan sosialisasi berjenjang terlebih dahulu mengenai Program BLT dan meminta petugas BPS hadir pada saat pembayaran BLT, supaya dapat membukakan datanya jika ada warga yang protes.	DKRPP&KB Kota Surakarta mengadakan sosialisasi berjenjang hingga sampai ke masyarakat mengenai program BLT, termasuk didalamnya syarat/kriteria warga yang berhak menerima dana BLT. Jika protes terjadi pada saat data sudah dirilis, maka DKRPP&KB Kota Surakarta meminta petugas BPS untuk

				membukakan datanya, apakah yang bersangkutan masuk kriteria penerima BLT atau tidak.
c.	Pada BLT tahun 2005 terdapat beberapa wilayah yang memotong dana BLT untuk keperluan bersama, tapi terkadang dana tersebut tidak terealisasi. Namun pada BLT 2008 pemotongan ini sudah tidak terjadi lagi.	DKRPP&KB Kota Surakarta bekerja sama Kantor Pos Kota Surakarta dalam penyaluran dana BLT. Disini DKRPP&KB Kota Surakarta bertugas memonitoring jalannya pembayaran BLT kepada RTS sedangkan Kantor Pos sebagai penyalur dana kepada RTS	Melarang adanya bentuk pemotongan untuk kepentingan bersama jika tidak ada kesepakatan dengan warga. Cara yang ditempuh adalah pengambilan dana BLT langsung oleh RTS tanpa perwakilan dan pada saat pengambilan DKRPP&KB Kota Surakarta melakukan monitoring serta menerima laporan jika	DKRPP&KB Kota Surakarta berupaya agar dana BLT diterima secara utuh oleh masyarakat miskin, maka pengambilan dana BLT 2008 dibagikan secara langsung kepada warga yang berhak menerima. Pengambilan disebar di beberapa titik lokasi agar proses pengambilan berjalan lancar, selain itu Kantor Pos juga membuat jadwal pengambilan. Petugas dari

			ada penyimpangan dana selama pelaksanaan Program BLT 2008.	DKRPP&KB Kota Surakarta mendampingi petugas dari Kantor Pos selama pembagian dana BLT. Petugas dari BPS juga hadir untuk mengantisipasi jika terdapat warga yang komplain karena tidak menerima dana BLT.
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	—	DKRPP&KB Kota Surakarta bertugas untuk memonitoring, mengevaluasi pelaksanaan program BLT di Kota Surakarta kemudian melaporkan hasilnya kepada pemerintah pusat secara berjenjang.	DKRPP&KB Kota Surakarta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program BLT 2008 di Kota Surakarta selama proses pelaksanaan Program BLT 2008.	Pada tahap ini, DKRPP&KB Kota Surakarta melakukan monitoring ke lokasi pembagian dana BLT, kemudian dievaluasi bagaimana pelaksanaan BLT 2008 di Kota Surakarta. DKRPP&KB Kota Surakarta juga menerima laporan dari masyarakat jika terdapat

				permasalahan selama pelaksanaan Program BLT untuk kemudian dibuat laporan berjenjang ke Pusat agar tidak terjadi permasalahan yang sama pada pelaksanaan yang akan datang.
--	--	--	--	--

BAB IV

PENUTUP

f. Kesimpulan

Dalam mencegah penyimpangan dana BLT, DKRPP&KB Kota Surakarta menggunakan strategi yang berpedoman pada Inpres No 3 Tahun 2008. Strategi bertujuan agar pelaksanaan Program BLT tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan dana. Selama penyaluran dana BLT, strategi yang digunakan DKRPP&KB Kota Surakarta dalam mencegah penyimpangan dana BLT 2008 di Kota Surakarta meliputi :

1. Optimalisasi monitoring untuk mengetahui sedini mungkin permasalahan yang mencuat pada saat pelaksanaan Program BLT. Dengan monitoring kesalahan sekecilpun dapat ditemukan sehingga dengan cepat akan dilakukan tindakan modifikasi mekanisme penyaluran dana BLT kepada RTS.
2. Sosialisasi mengenai Program BLT secara berjenjang ke tingkat bawah sebelum pelaksanaan Program BLT.
3. Untuk meminimalisir adanya pemotongan dana BLT oleh petugas setempat, maka DKRPP&KB Kota Surakarta melarang adanya pemotongan dana untuk alasan apapun. Strategi yang ditempuh adalah pengambilan dana BLT langsung oleh RTS tanpa perwakilan dengan membawa identitas diri, disini DKRPP&KB

Kota Surakarta bekerja sama dengan Kantor Pos.

4. Untuk mengantisipasi adanya warga yang tidak terima karena tidak mendapat dana BLT, maka DKRPP&KB Kota Surakarta meminta petugas BPS untuk hadir pada saat pembayaran agar membukakan datanya, apakah yang bersangkutan masuk kriteria penerima BLT atau tidak.
5. Strategi yang selanjutnya adalah DKRPP&KB Kota Surakarta mengevaluasi pelaksanaan Program BLT untuk mengukur tingkat efisiensi dan dampak Program BLT bagi RTS. DKRPP&KB Kota Surakarta juga menerima laporan dari masyarakat jika terdapat permasalahan selama pelaksanaan Program BLT untuk kemudian dibuat laporan berjenjang ke Pusat agar tidak terjadi permasalahan yang sama pada pelaksanaan yang akan datang.

Dalam mengimplementasikan strategi, DKRPP&KB Kota Surakarta juga menetapkan indikator keberhasilan strategi yang digunakan. Indikator tersebut diantaranya tidak adanya laporan dari masyarakat yang tidak terima mengenai Program BLT dan dana BLT 2008 tepat sasaran.

g. Saran

Berdasarkan analisis diatas, saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut :

- 8) Pembinaan penyaluran BLT yang akan datang dapat dimulai dari kriteria kemiskinan yang lebih tepat. Untuk itu pemerintah dalam hal ini BPS perlu memikirkan penentuan kriteria yang lebih sesuai untuk di lapangan, atau dapat dengan alternatif menggunakan 14 kriteria yang sama namun dilakukan pembobotan sehingga justifikasi petugas di lapangan akan lebih obyektif.
- 9) Untuk mengatasi kemungkinan penerimaan BLT secara ganda (akibat tidak terlalu diperlukannya KTP di lapangan), maka perlu dibuat sistem yang lebih tegas mengenai KTP. Salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan menggunakan PIN nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Freddy Rangkuti. 1997. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadari Nawawi. 2003. *Manajemen Strategik : Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- H.B. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Hessel Nogi S Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT Grasindo.
- Irawan Soehartono. 1998. *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- J. David Hunger & Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis*. Terjemahan Julianto Agung. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- J. Salusu. 2004. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Non Profit*. Jakarta : PT. Grasindo.
- John M. Bryson. 2003. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Terjemahan Miftahuddin. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Lexy J Moleong. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Masri Singarimbun dan Soffian Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Michael Allison & Jude Kaye. 2005. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*. Terjemahan Faisal Basri. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mudrajad Kuncoro. 2006. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta : Erlangga.
- Nurhadi. 2007. *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*.

Yogyakarta : Media Wacana.

Soejono Trimono. 1984. *Perencanaan Strategis Salah Satu Dimensi dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Bandung : Angkasa.

Sugiyono. 1997. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta.

Sumodiningrat, dkk. 1999. *Kemiskinan : Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta : Impac.

Susanto. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.

Yosal Irianta. 2004. *Manajemen Strategis Public Relation*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia

Jurnal

Adolfo Martinez Valle. 2009. "Social class, marginality and self-assessed health: a cross-sectional analysis of the health gradient in Mexico". *International Journal for Equity in Health*. Vol 8 Issue 3. (diakses melalui <http://www.equityhealthj.com/content/8/1/3>).

Paula Jarzabkowski and Andreas Paul Spee. 2009. " Strategy-as-practice: A review and future directions for the field". *International Journal of Management Reviews* Vol. 11 Issue 1. pp 69-95. (diakses melalui <http://www.interscience.wiley.com>).

Sumber lain

Tim. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Panduan Bagi Petugas Layanan Informasi Untuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM 2008.

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Rumah Tangga Sasaran.

Pengambilan BLT Di Solo Disebar 18 Titik. (<http://www.promojateng-pemprovjateng.com/berita.php?id=5435>, diakses 13 September 2008).

Nah Lho, BLT Solo Juga Dipotong.

(<http://www1.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=13132>, diakses 13 September 2008).

Lurah Keberatan Terlibat Verifikasi; BLT Solo Dicairkan Juni dengan Data Lama

(<http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=164210&actmenu=38>, diakses 13 September 2008).